

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2023 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 dan Penjabaran APBD ditetapkan melalui Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 51 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022. Perubahan APBD tahun anggaran 2023 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 7 November 2023 dan Penjabaran Perubahan APBD ditetapkan melalui Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2023 tanggal 7 November 2023.

Secara ringkas APBD Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2023 setelah perubahan menetapkan target pendapatan sebesar Rp1.428.935.942.184,00, belanja sebesar Rp1.506.699.351.579,00, dan defisit sebesar Rp(77.763.409.395,00). Defisit anggaran tahun 2023 dianggarkan akan ditutup dengan pembiayaan neto sebesar Rp77.763.409.395,00.

Untuk mendapat gambaran secara keseluruhan tentang rencana dan realisasi APBD Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2023 dapat digambarkan pada uraian berikut ini.

A. PENDAPATAN DAERAH

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
1.394.096.335.144,51	1.348.628.181.500,28

Realisasi Pendapatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.394.096.335.144,51 dan Rp1.348.628.181.500,28 d.h.i mengalami peningkatan sebesar Rp45.468.153.644,23 atau sebesar 3,37%. Pendapatan Daerah TA 2023 terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Daerah TA 2023 dalam tabel berikut:

Tabel 5. 1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	154.407.759.462,00	149.562.514.756,51	96,86	126.243.905.166,28
2.	Pendapatan Transfer	1.274.028.182.722,00	1.244.088.529.388,00	97,65	1.191.493.250.334,00
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	500.000.000,00	445.291.000,00	89,06	30.891.026.000,00
Jumlah Pendapatan		1.428.935.942.184,00	1.394.096.335.144,51	97,56	1.348.628.181.500,28

Penjelasan terhadap pendapatan dan realisasi anggaran tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
149.562.514.756,51	126.243.905.166,28

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp154.407.759.462,00 dengan realisasi sebesar Rp149.562.514.756,51 atau 96,86%. Jika dibandingkan realisasi PAD Tahun 2022 sebesar Rp126.243.905.166,28 maka realisasi Tahun 2023 lebih tinggi sebesar Rp23.318.609.590,23 atau 18,47%.

Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen PAD adalah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
61.970.456.485,81	50.121.822.881,24

Untuk tahun anggaran 2023 penerimaan pajak daerah ditargetkan sebesar Rp66.050.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp61.970.456.485,81 atau 93,82%. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun 2022 sebesar Rp50.121.822.881,24 pajak daerah untuk Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp11.848.633.604,57 atau 23,64%.

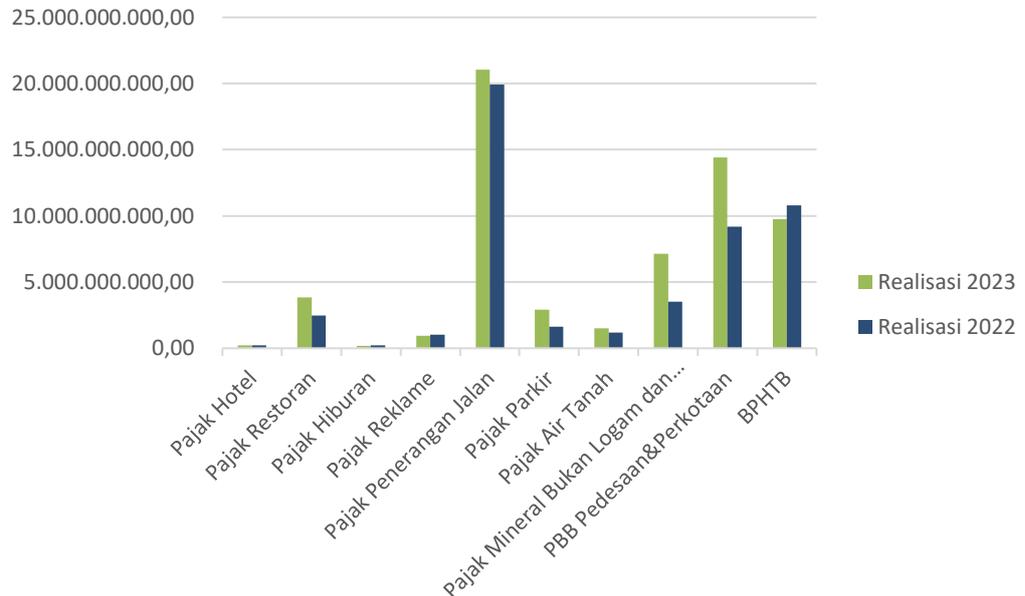
Rincian anggaran dan realisasi pajak daerah dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 2. Target dan Realisasi Pajak Daerah

No	Jenis Pajak Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pajak Hotel	200.000.000,00	218.946.253,00	109,47	200.571.992,00
2.	Pajak Restoran	3.500.000.000,00	3.824.851.501,81	109,28	2.486.754.287,24
3.	Pajak Hiburan	200.000.000,00	167.372.800,00	83,69	200.955.600,00
4.	Pajak Reklame	1.000.000.000,00	950.104.406,00	95,01	1.014.234.565,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	21.000.000.000,00	21.057.720.441,00	100,27	19.915.265.373,00
6.	Pajak Parkir	2.800.000.000,00	2.919.636.000,00	104,27	1.630.590.000,00
7.	Pajak Air Tanah	1.350.000.000,00	1.491.916.392,00	110,51	1.177.256.468,00
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya	6.000.000.000,00	7.146.130.900,00	119,10	3.531.787.190,00
9.	PBB Pedesaan & Perkotaan	18.000.000.000,00	14.431.339.363,00	80,17	9.185.703.947,00
10.	BPHTB	12.000.000.000,00	9.762.438.429,00	81,35	10.778.703.459,00
Jumlah		66.050.000.000,00	61.970.456.485,81	93,82	50.121.822.881,24

Berdasarkan rincian penerimaan Pajak Daerah diatas terlihat bahwa penerimaan Pajak yang tidak mencapai target yang ditetapkan seperti Pajak Hiburan, Pajak Reklame, PBB Pedesaan & Perkotaan dan BPHTB. Apabila dilihat dari sisi nilai maka kontribusi realisasi penerimaan Pajak Daerah yang tertinggi adalah penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp21.057.720.441,00 atau 33,98% dari total realisasi Penerimaan Pajak Daerah.

Gambar 5. 1. Perbandingan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023 - 2022



b. Retribusi Daerah

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
3.603.184.590,00	2.472.939.567,00

Target penerimaan retribusi daerah pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp3.865.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.603.184.590,00 atau 93,23%. Dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2022 sebesar Rp2.472.939.567,00 retribusi daerah untuk Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.130.245.023,00 atau 45,70%.

Adapun penyebab tidak tercapainya target pendapatan retribusi tahun ini karena masih rendahnya penerimaan beberapa retribusi daerah bahkan terdapat retribusi daerah yang capaiannya dibawah 50% yaitu Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Rincian anggaran dan realisasi retribusi daerah dapat disajikan dalam tabel berikut:

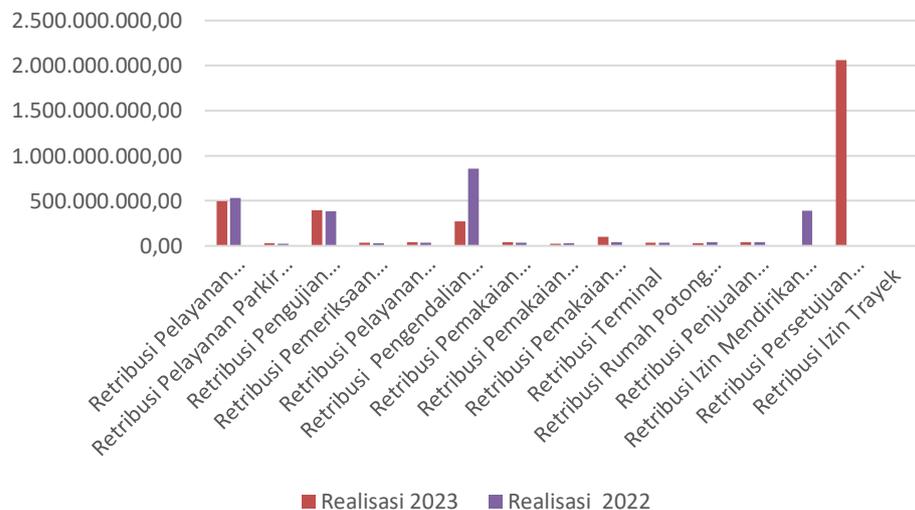
Tabel 5. 3. Target dan Realisasi Retribusi Daerah

No.	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	450.000.000,00	493.550.000,00	109,68	532.550.000,00
2.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	30.000.000,00	30.524.000,00	101,75	26.283.000,00
3.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	450.000.000,00	395.662.900,00	87,93	382.085.000,00
4.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	40.000.000,00	36.690.500,00	91,73	28.434.500,00
5.	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	50.000.000,00	38.951.000,00	77,90	36.279.700,00
6.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	550.000.000,00	272.500.000,00	49,55	856.570.000,00
7.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	175.000.000,00	169.256.080,00	96,72	106.784.920,00
8.	Retribusi Terminal	40.000.000,00	36.092.000,00	90,23	33.665.000,00
9.	Retribusi Rumah Potong Hewan	40.000.000,00	31.720.000,00	79,30	40.025.000,00
10.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	40.000.000,00	40.050.000,00	100,13	40.000.000,00
11.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.000.000.000,00	2.058.188.110,00	102,91	390.017.447,00
12.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	245.000,00
	Jumlah	3.865.000.000,00	3.603.184.590,00	93,23	2.472.694.567,00

Tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan capaian target Retribusi sebesar 45,70% dibandingkan dengan Tahun 2022.

Gambar 5. 2. Perbandingan Realisasi Retribusi Daerah

Tahun 2023 - 2022



c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
8.088.751.162,00	7.214.956.413,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp8.088.751.162,00 dengan realisasi sebesar Rp8.088.751.162,00 atau 100%. Jika dibandingkan dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 sebesar Rp7.214.956.413,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp873.794.749,00 atau 12,11%.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari:

- 1) Setoran dividen Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari) tahun buku 2022 yang diterima di Kas Umum Daerah pada tanggal 11 April 2023 sebesar Rp8.006.468.822,00; dan
- 2) Setoran dividen BPR-PKPP tahun buku 2022 yang diterima di Kas Umum Daerah pada tanggal 28 April 2023 sebesar Rp82.282.340,00.

Tabel 5. 4. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dividen Bank Nagari	8.006.468.822,00	8.006.468.822,00	100	7.155.454.941,00
2.	Dividen BPR-PKPP	82.282.340,00	82.282.340,00	100	48.307.000,00
3.	Dividen Balairung	0,00	0,00	0,00	11.194.472,00
	Jumlah	8.088.751.162,00	8.088.751.162,00	100	7.214.956.413,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
75.900.122.518,70	66.434.186.305,04

Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp76.404.008.300,00 dengan realisasi sebesar Rp75.900.122.518,70 atau 99,34%. Jika dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 sebesar Rp66.434.186.305,04 terdapat kenaikan sebesar Rp9.465.936.213,66 atau 14,25%.

Gambaran realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 5. Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

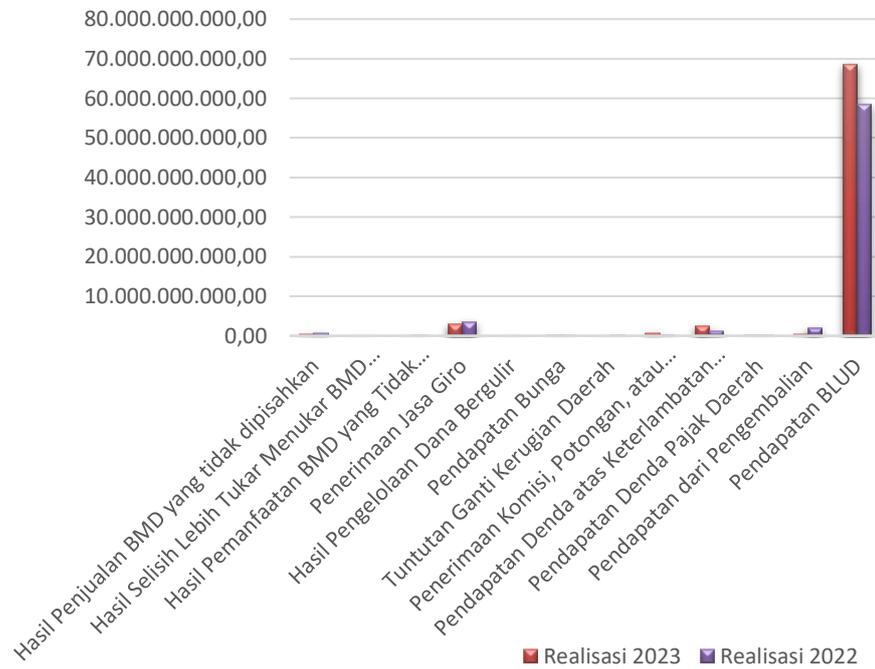
No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	500.000.000,00	460.988.772,00	92,20	736.931.794,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00
3.	Penerimaan Jasa Giro	3.500.000.000,00	2.878.023.051,00	82,23	3.533.544.958,00
4.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pendapatan Bunga	500.000,00	77.948,00	15,59	184.098,00
6.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00	57.557.500,00
7.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.200.000.000,00	717.505.461,84	59,79	302.740.058,82
8.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000.000,00	2.504.392.337,31	250,44	1.172.333.327,80
9.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	93.000.000,00	114.948.148,00	123,60	101.397.159,00
10.	Pendapatan dari Pengembalian	500.000.000,00	490.785.728,55	98,16	1.979.908.262,42
11.	Pendapatan BLUD	69.610.508.300,00	68.733.401.072,00	98,74	58.512.089.147,00
Jumlah		76.404.008.300,00	75.900.122.518,70	99,34	66.434.186.305,04

Dari rincian penerimaan diatas dapat dijelaskan juga bahwa:

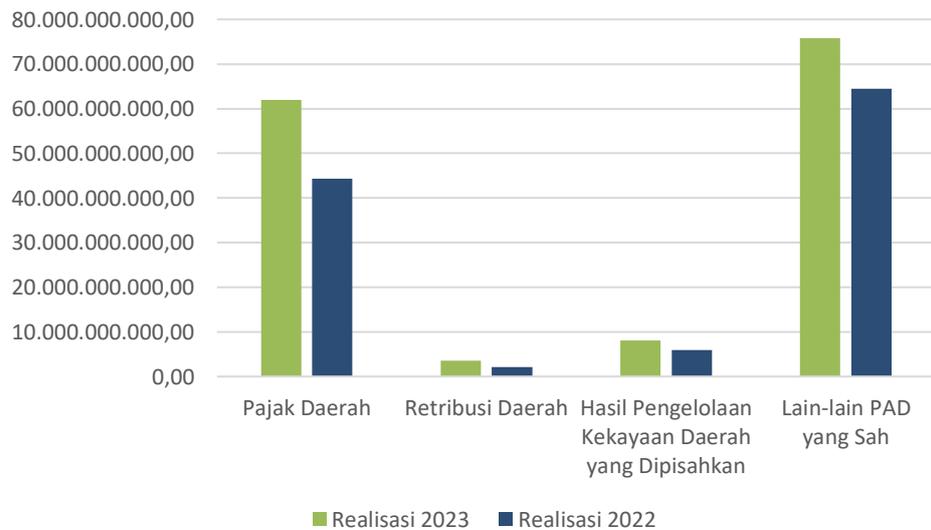
- 1) Penerimaan Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp460.988.772,00 merupakan Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-lain;
- 2) Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp2.878.023.051,00 merupakan Jasa Giro pada Kas Daerah;
- 3) Pendapatan Bunga sebesar Rp77.948,00 merupakan Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah;
- 4) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp114.948.148,00 merupakan Pendapatan Denda Pajak Restoran sebesar Rp206.560,00, Pendapatan Denda Pajak Reklame sebesar Rp945.200,00 dan Pendapatan Denda Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebesar Rp113.796.388,00; dan
- 5) Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp490.785.728,55 merupakan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp166.771.648,00 dan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp324.014.080,55.

Berdasarkan Penjelasan atas Pendapatan Asli Daerah diatas dapat dilihat bahwa adanya kenaikan beberapa komponen penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun 2022.

Gambar 5. 3. Perbandingan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 - 2022



Gambar 5. 4. Pendapatan Asli Daerah



2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer merupakan akun yang menampung penerimaan transfer yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah.

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

- a. Dana Perimbangan;
 - 1) Dana Bagi Hasil (DBH);
 - 2) Dana Alokasi Umum (DAU);
 - 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - 4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik; dan
- b. Dana Desa.

Pendapatan transfer Antar Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Bagi hasil; dan
- b. Bantuan Keuangan.

Adapun rincian dari Pendapatan Transfer dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 6. Target dan Realisasi Pendapatan Transfer

No	Jenis Penerimaan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.188.905.511.670,00	1.181.930.150.981,00	99,41	1.116.029.110.626,00
	Dana Perimbangan	1.087.361.386.670,00	1.080.386.025.981,00	99,36	1.019.939.145.626,00
	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00		1.317.667.000,00
	Dana Desa	101.544.125.000,00	101.544.125.000,00	100,00	94.772.298.000,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	85.122.671.052,00	62.158.378.407,00	73,02	75.464.139.708,00
	Pendapatan Bagi Hasil	84.822.671.052,00	61.858.378.407,00	72,93	75.464.139.708,00
	Bantuan Keuangan	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	1.274.028.182.722,00	1.244.088.529.388,00	97,65	1.191.493.250.334,00

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2023 realisasi Penerimaan dari Pendapatan Transfer sebesar Rp1.244.088.529.388,00 atau 97,65%.

Jika dibandingkan dengan penerimaan Pendapatan Transfer tahun 2022 sebesar Rp1.191.493.250.334,00 maka penerimaan untuk tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp52.595.279.054,00 atau 4,41%. Rincian Pendapatan Transfer sebagai berikut:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
1.181.930.150.981,00	1.116.029.110.626,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan, dan Dana Desa. Dasar penganggaran Dana Transfer tahun anggaran 2023 adalah Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp1.188.905.511.670,00 dengan realisasi sebesar Rp1.181.930.150.981,00 atau 99,41%. Rincian Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 7. Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Jenis Penerimaan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dana Perimbangan	1.087.361.386.670,00	1.080.386.025.981,00	99,36	1.019.939.145.626,00
2.	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	1.317.667.000,00
3.	Dana Desa	101.544.125.000,00	101.544.125.000,00	100,00	94.772.298.000,00
Jumlah		1.188.905.511.670,00	1.181.930.150.981,00	99,41	1.116.029.110.626,00

Dari tabel di atas terlihat realisasi penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan Penerimaan Tahun 2022 sebesar Rp65.901.040.355,00 atau 5,90%.

1) Dana Perimbangan

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
1.080.386.025.981,00	1.019.939.145.626,00

Dana Perimbangan tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.087.361.386.670,00 dengan realisasi sebesar Rp1.080.386.025.981,00 atau 99,36%. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2022 sebesar Rp1.019.939.145.626,00 Realisasi tahun 2023 naik sebesar Rp60.446.880.355,00 atau 5,93%.

Rincian rencana dan realisasi penerimaan Dana Perimbangan sebagai berikut:

Tabel 5. 8. Target dan Realisasi Dana Perimbangan

No	Jenis Penerimaan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dana Bagi Hasil (DBH)	15.713.739.670,00	16.486.805.665,00	104,92	18.057.503.080,00

No	Jenis Penerimaan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	734.535.724.000,00	744.273.216.799,00	101,33	704.448.324.710,00
3.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	98.261.322.000,00	87.426.804.427,00	88,97	93.252.089.236,00
4.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	238.850.601.000,00	232.199.199.090,00	97,22	204.181.228.600,00
Jumlah		1.087.361.386.670,00	1.080.386.025.981,00	99,36	1.019.939.145.626,00

Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebagai berikut:

a) **Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)**

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
16.486.805.665,00	18.057.503.080,00

Penerimaan Dana Transfer Umum-DBH tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp15.713.739.670,00 dengan realisasi sebesar Rp16.486.805.665,00 atau 104,92%. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 sebesar Rp18.057.503.080,00 realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.570.697.415,00 atau 8,70%.

Realisasi DBH Tahun 2023 merupakan gabungan dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA) yang masing-masingnya berjumlah Rp7.024.058.665,00 dan Rp9.462.747.000. Rincian rencana dan realisasi penerimaan DBH sebagai berikut:

Tabel 5. 9. Target dan Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Jenis Penerimaan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	980.340.000,00	1.707.356.625,00	174,16	6.084.000.714,00
2.	DBH PPh Pasal 21	6.263.645.319,00	5.275.349.000,00	84,22	7.468.728.838,00
3.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	40.662.014,00	41.353.040,00	101,70	41.567.633,00
4.	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	214.896.000,00	300.596.000,00	139,88	851.066.752,00
5.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	1.325.406.882,00	1.550.345.000,00	116,97	1.524.116.143,00
6.	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	5.647.192.000,00	5.992.868.000,00	106,12	129.712.000,00
7.	DBH SDA Kehutanan-luran Izin Usaha	91.393.000,00	0,00	0,00	0,00

No	Jenis Penerimaan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Pemanfaatan Hutan (IIUPH)				
8.	DBH SDA Perikanan	1.150.204.455,00	1.618.938.000,00	140,75	1.958.311.000,00
Jumlah		15.713.739.670,00	16.486.805.665,00	104,92	18.057.503.080,00

b) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
744.273.216.799,00	704.448.324.710,00

Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp734.535.724.000,00 dengan realisasi sebesar Rp744.273.216.799,00 atau 101,33%. Dibandingkan realisasi DAU Tahun 2022 sebesar Rp704.448.324.710,00 penerimaan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp39.824.892.089,00 atau 5,65%.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
87.426.804.427,00	93.252.089.236,00

Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus Fisik tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp98.261.322.000,00 dengan realisasi sebesar Rp87.426.804.427,00 atau 88,97%. Dibandingkan realisasi DAK Fisik Tahun 2022 sebesar Rp93.252.089.236,00 penerimaan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp5.825.284.809,00 atau 6,25%.

d) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
232.199.199.090,00	204.181.228.600,00

Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp238.850.601.000,00 dengan realisasi sebesar Rp232.199.199.090,00 atau 97,22%. Dibandingkan realisasi DAK Non Fisik Tahun 2022 sebesar Rp204.181.228.600,00 penerimaan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp28.017.970.490,00 atau 13,72%.

2) Dana Insentif Daerah (DID)

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
0,00	1.317.667.000,00

Penerimaan dari Dana Insentif Daerah (DID) tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00. Dibandingkan dengan realisasi DID Tahun 2022 sebesar

Rp1.317.667.000,00 penerimaan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.317.667.000,00.

3) Dana Desa

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
101.544.125.000,00	94.772.298.000,00

Penerimaan Dana Desa tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp101.544.125.000,00 dengan realisasi sebesar Rp101.544.125.000,00 atau 100%. Dibandingkan dengan realisasi Dana Desa Tahun 2022 sebesar Rp94.772.298.000,00 penerimaan Dana Desa Tahun 2023 meningkat sebesar Rp6.771.827.000,00 atau 7,15%.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
62.158.378.407,00	75.464.139.708,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023 merupakan penerimaan yang berasal dari Transfer Pemerintah Provinsi dalam bentuk Pendapatan Bagi Hasil yang dianggarkan sebesar Rp85.122.671.052,00 dengan realisasi sebesar Rp62.158.378.407,00 atau 73,02%. Bila dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2022 sebesar Rp75.464.139.708,00 pendapatan ini menurun sebesar Rp13.305.761.301,00 atau 17,63%.

Tabel 5. 10 Target dan Realisasi Penerimaan Transfer Antar Daerah

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil	84.822.671.052,00	61.858.378.407,00	72,93	75.464.139.708,00
2.	Bantuan Keuangan	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah		85.122.671.052,00	62.158.378.407,00	73,02	75.464.139.708,00

1) Pendapatan Bagi Hasil

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
61.858.378.407,00	75.464.139.708,00

Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2023 berasal dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp84.822.671.052,00 dengan realisasi sebesar Rp61.858.378.407,00 atau 72,93%. Dibanding penerimaan Tahun 2022 pendapatan ini mengalami penurunan sebesar Rp13.605.761.301,00 atau 18,03%.

Dasar penganggaran dari Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2023 adalah Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-105-2023 tanggal 21 Februari 2023 tentang Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat TA 2023, dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-

835-2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-105-2023 tentang Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat TA 2023

Sementara dasar pengakuan realisasi Pendapatan Bagi Hasil mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/04/PPD-Bapenda/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat tahun anggaran 2023.

Tabel 5. 11. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Bagi hasil Pajak Kendaraan bermotor	19.049.011.751,00	13.091.514.828,00	68,73	15.526.033.090,00
2.	Bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.103.009.697,00	6.617.095.639,00	72,69	8.477.348.167,00
3.	Bagi hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	35.295.786.492,00	22.609.172.776,00	64,06	31.280.133.881,00
4.	Bagi hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	154.600.950,00	105.177.988,00	68,03	98.906.626,00
5.	Bagi Hasil Pajak Rokok	21.220.262.162,00	19.435.417.176,00	91,59	20.081.717.944,00
Jumlah		84.822.671.052,00	61.858.378.407,00	72,93	75.464.139.708,00

2) Bantuan Keuangan

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
300.000.000,00	0,00

Penerimaan Bantuan Keuangan Tahun 2023 berasal dari Provinsi Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp300.000.000,00.

Tabel 5. 12. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Bantuan Keuangan Bersifat Khusus	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00

Komposisi komponen Pendapatan Dana Transfer digambarkan dalam grafik dibawah ini.

Gambar 5. 5. Perbandingan Realisasi Dana Transfer Tahun 2023 - 2022



3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	445.291.000,00	30.891.026.000,00

Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menganggarkan penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp445.291.000,00 atau 89,06%. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2022 sebesar Rp30.891.026.000,00 realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp30.445.735.000,00 atau 98,56%. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 merupakan Pendapatan Hibah.

Tabel 5. 13. Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah	500.000.000,00	445.291.000,00	89,06	30.891.026.000,00
	Jumlah	500.000.000,00	445.291.000,00	89,06	30.891.026.000,00

a. Pendapatan Hibah

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	445.291.000,00	30.891.026.000,00

Pendapatan hibah Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp445.291.000,00 merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat. Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2022 sebesar Rp30.891.026.000,00 realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp30.445.735.000,00 atau 98,56%.

Dari total realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 sebesar Rp1.394.096.335.144,51 dapat kita lihat bahwa kontribusi PAD 10,73%, Pendapatan Transfer 89,24% dan Lain-lain

Pendapatan yang Sah 0,03%. Komposisi pendapatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman TA 2023 dan 2022 digambarkan dalam grafik di bawah ini:

Gambar 5. 6. Porsi Pendapatan Tahun 2023 dan 2022



Dari gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terhadap dana transfer masih cukup tinggi, yaitu sebesar 89,24%.

B. BELANJA DAERAH

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.405.956.633.170,01	1.314.912.642.338,42

Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengalokasikan Belanja Daerah sebesar Rp1.506.699.351.579,00 dengan realisasi sebesar Rp1.405.956.633.170,01 atau 93,31%. Dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.314.912.642.338,42 mengalami kenaikan sebesar Rp91.043.990.831,59 atau 6,92%.

Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja Tahun 2023 dikelompokkan menjadi empat yaitu:

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah;
 - d. Belanja Bantuan Sosial;
2. Belanja Modal
 - a. Belanja Modal Tanah;

- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
3. Belanja Tidak Terduga;
 4. Belanja Transfer;
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

Secara rinci rencana dan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 14. Target dan Realisasi Belanja

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Operasi	1.104.393.361.754,00	1.034.417.684.452,25	93,66	1.006.898.685.609,42
2.	Belanja Modal	214.748.328.977,00	188.292.502.818,76	87,68	135.087.564.500,00
3.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	1.729.558.250,00	57,65	616.219.436,00
4.	Belanja Transfer	184.557.660.848,00	181.516.887.649,00	98,35	172.310.172.793,00
Jumlah		1.506.699.351.579,00	1.405.956.633.170,01	93,31	1.314.912.642.338,42

Rincian Belanja Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. BELANJA OPERASI

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.034.417.684.452,25	1.006.898.685.609,42

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.104.393.361.754,00 dengan realisasi sebesar Rp1.034.417.684.452,25 atau 93,66%. Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.006.898.685.609,42 Belanja Operasi tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 27.518.998.842,83 atau 2,73%. Rincian Belanja Operasi sebagai berikut:

Tabel 5. 15. Target dan Realisasi Belanja Operasi

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Pegawai	706.137.192.896,00	673.846.730.780,32	95,43	672.789.484.454,42
2.	Belanja Barang dan Jasa	370.048.964.298,00	335.371.214.311,93	90,63	319.270.104.255,00
3.	Belanja Hibah	27.907.204.560,00	24.899.739.360,00	89,22	10.315.746.900,00

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
4.	Bantuan Sosial	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	4.523.350.000,00
	Jumlah	1.104.393.361.754,00	1.034.417.684.452,25	93,66	1.006.898.685.609,42

Realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2023 terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
673.846.730.780,32	672.789.484.454,42

Belanja Pegawai tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp706.137.192.896,00 dengan realisasi sebesar Rp673.846.730.780,32 atau 95,43%.

Dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022 yaitu sebesar Rp672.789.484.454,42 Belanja Pegawai tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.057.246.325,90 atau 0,16%.

Adapun rincian dari belanja pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 16. Target dan Realisasi Belanja Pegawai

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	425.835.848.970,00	405.238.342.093,00	95,16	404.263.372.994,42
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	94.538.863.495,00	89.930.523.484,00	95,13	95.895.024.321,00
3.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	139.036.140.200,00	133.403.420.909,00	95,95	134.823.296.090,00
4.	Belanja Gaji dan tunjangan DPRD	15.531.885.456,00	15.456.630.613,00	99,52	15.508.508.033,00
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	783.719.566,00	695.774.514,00	88,78	483.789.034,00
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	681.157.200,00	680.880.000,00	99,96	614.880.000,00
7.	Belanja Pegawai BLUD	29.729.578.009,00	28.441.159.167,32	95,67	21.200.613.982,00
	Jumlah	706.137.192.896,00	673.846.730.780,32	95,43	672.789.484.454,42

b. Belanja Barang dan Jasa

Tahun 2023 **Tahun 2022**
(Rp) **(Rp)**
335.371.214.311,93 **319.270.104.255,00**

Belanja Barang tahun anggaran 2023 dianggarkan Rp370.048.964.298,00 dengan realisasi sebesar Rp335.371.214.311,93 atau 90,63%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp319.270.104.255,00, mengalami peningkatan sebesar Rp16.101.110.056,93 atau 5,04%. Anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa per komponen biaya tahun 2023 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 17. Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Barang Pakai Habis	104.297.706.183,00	91.085.320.995,93	87,33	79.975.510.997,00
2.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
3.	Belanja Jasa Kantor	87.683.724.835,00	82.222.363.609,00	93,77	74.741.792.178,00
4.	Belanja Luran Jaminan/Asuransi	15.271.183.362,00	14.948.529.324,00	97,89	11.883.416.017,00
5.	Belanja Sewa Tanah	245.500.000,00	221.122.500,00	90,07	2.500.000,00
6.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.373.422.940,00	4.057.640.167,00	92,78	3.159.515.992,00
7.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.505.247.000,00	3.229.470.900,00	92,13	3.220.863.050,00
8.	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	15.000.000,00	4.169.998,00	27,80	66.000.000,00
9.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	0,00
10.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	664.724.400,00	445.368.000,00	67,00	2.320.416.320,00
11.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	144.800.000,00	143.777.043,00	99,29	397.375.800,00
12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
13.	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	4.800.000,00	2.806.069,00	58,46	12.000.000,00
14.	Belanja Pemeliharaan Tanah	111.027.750,00	110.703.000,00	99,71	0,00
15.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.067.620.670,00	1.423.572.165,00	68,85	2.501.031.957,00

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
16.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.010.840.356,00	598.583.367,00	59,22	1.318.765.573,00
17.	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	1.728.869.192,00	1.575.828.521,00	91,15	1.728.155.748,00
18.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
19.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	61.923.651.585,00	50.738.164.136,00	81,94	57.118.729.296,00
20.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	148.941.370,00
21.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	525.010.000,00	509.410.000,00	97,03	1.075.872.500,00
22.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.361.286.400,00	959.768.475,00	70,50	256.986.000,00
23.	Belanja Barang dan Jasa BOS	48.227.006.659,00	46.880.402.377,00	97,21	46.940.955.534,00
24.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	36.830.542.966,00	36.187.213.665,00	98,25	32.401.275.923,00
	Jumlah	370.048.964.298,00	335.371.214.311,93	90,63	319.272.404.255,00

c. Belanja Hibah

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
24.899.739.360,00	10.315.746.900,00

Belanja Hibah Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp27.907.204.560,00 dengan realisasi sebesar Rp24.899.739.360,00 atau 89,22%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp10.315.746.900,00, Belanja Hibah Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp14.583.992.460,00 atau 141,38%.

Anggaran dan realisasi Belanja Hibah per komponen biaya Tahun 2023 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 18. Target dan Realisasi Belanja Hibah Tahun Tahun 2023 dan 2022

No.	Jenis	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	16.561.194.560,00	16.561.194.560,00	100,00	0,00
2.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	7.549.000.000,00	4.541.760.000,00	60,16	6.995.558.000,00

No.	Jenis	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
3.	Belanja Hibah Dana BOS	2.840.500.000,00	2.840.274.800,00	99,99	2.363.678.900,00
4.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	956.510.000,00	956.510.000,00	100,00	956.510.000,00
Total		27.907.204.560,00	24.899.739.360,00	89,22	10.315.746.900,00

Penjelasan atas tabel diatas sebagai berikut.

Tabel 5. 19. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat

No.	Nama Penerima	Nilai (Rp)
1.	Belanja Hibah ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 berdasarkan NPHD Nomor 911/174/NPHD.KESBANGPOL-2023 tanggal 10 November 2023 dan Persetujuan Bupati Padang Pariaman tanggal 18 Desember 2023	11.361.194.560,00
2.	Belanja Hibah ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 berdasarkan NPHD Nomor 911/175/NPHD.KESBANGPOL-2023 tanggal 10 November 2023 dan Persetujuan Bupati Padang Pariaman tanggal 18 Desember 2023	5.200.000.000,00
Jumlah		16.561.194.560,00

Nilai belanja hibah pada pemerintah pusat sebesar Rp16.561.194.560,00 merupakan hibah pemerintah daerah kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 uang tersebut belum digunakan dan masih tersimpan pada Rekening Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Tabel 5. 20. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

No.	Nama Penerima	Nilai (Rp)
1.	Hibah Kepada BAZNAS	150.000.000,00
2.	Hibah Kepada KNPI	350.000.000,00
Jumlah		500.000.000,00

Tabel 5. 21. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

No.	Nama Penerima	Nilai (Rp)
1.	Pembayaran penggantian Uang Tali Asih Veteran LVRI Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS Dan NAPZA Pada Dinsos P3A TA 2023 An. Afrizaldi, SE	40.800.000,00
Jumlah		40.800.000,00

Tabel 5. 22. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

No.	Nama Penerima	Nilai (Rp)
1.	Hibah Kepada KONI	500.000.000,00

No.	Nama Penerima	Nilai (Rp)
2.	Hibah Kepada Pramuka	600.000.000,00
3.	Hibah Kepada PMI	150.000.000,00
4.	Hibah Kepada NPC	120.000.000,00
5.	Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.748.960.000,00
6.	Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	882.000.000,00
Jumlah		4.000.960.000,00

Tabel 5. 23. Belanja Hibah Dana BOS

No.	Nama Penerima	Nilai (Rp)
1.	Hibah Uang Dana BOS	2.840.274.800,00
Jumlah		2.840.274.800,00

Tabel 5. 24. Anggaran Dan Realisasi Hibah Kepada Partai Politik

No.	Jenis	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Partai Nasional Demokrat	70.915.000,00	70.915.000,00	100,00	70.915.000,00
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	76.565.000,00	76.565.000,00	100,00	76.565.000,00
3.	Partai Keadilan Kesejahteraan	121.655.000,00	121.655.000,00	100,00	121.655.000,00
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	43.440.000,00	43.440.000,00	100,00	43.440.000,00
5.	Partai Golongan Karya	90.820.000,00	90.820.000,00	100,00	90.820.000,00
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	164.355.000,00	164.355.000,00	100,00	164.355.000,00
7.	Partai Demokrat	95.830.000,00	95.830.000,00	100,00	95.830.000,00
8.	Partai Amanat Nasional	158.010.000,00	158.010.000,00	100,00	158.010.000,00
9.	Partai Persatuan Pembangunan	95.585.000,00	95.585.000,00	100,00	95.585.000,00
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	39.335.000,00	39.335.000,00	100,00	39.335.000,00
Jumlah		956.510.000,00	956.510.000,00	100,00	956.510.000,00

d. Bantuan Sosial

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
300.000.000,00	4.523.350.000,00

Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp300.000.000,00 atau 100%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp4.523.350.000,00, realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp4.223.350.000,00 atau 93,37%.

Belanja Bantuan Sosial tersebut merupakan belanja bantuan sosial stimulasi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Daftar Penerima Bantuan Sosial di Tahun 2023, dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

2. BELANJA MODAL

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
188.292.502.818,76	135.087.564.500,00

Belanja Modal ini merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (satu tahun). Belanja Modal tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp214.748.328.977,00 dengan realisasi sebesar Rp188.292.502.818,76 atau 87,68%.

Dibandingkan realisasi Belanja Modal tahun 2022 sebesar Rp135.087.564.500,00 Belanja Modal tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp53.204.938.318,76 atau 39,39%. Anggaran dan realisasi belanja modal per komponen biaya Tahun 2023 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 25. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.566.375.468,00	34.104.526.420,00	93,27	30.445.954.899,00
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.372.871.506,00	29.755.595.199,76	94,84	34.708.818.439,00
3.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	141.886.618.480,00	119.326.461.876,00	84,10	66.520.884.059,00
4.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.922.463.523,00	5.105.919.323,00	103,73	3.411.907.103,00
Jumlah		214.748.328.977,00	188.292.502.818,76	87,68	135.087.564.500,00

Rincian Belanja Modal tersebut adalah sebagai berikut.

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
34.104.526.420,00	30.445.954.899,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp36.566.375.468,00 dengan realisasi sebesar Rp34.104.526.420,00 atau 93,27%. Dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp30.445.954.899,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp3.658.571.521,00 atau 12,02%.

Tabel 5. 26. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Alat Bantu	942.963.170,00	824.512.170,00	87,44	0,00
2.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.921.590.625,00	3.920.348.750,00	99,97	1.872.393.575,00

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
3.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	12.500.000,00	12.377.000,00	99,02	0,00
4.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	1.647.406.000,00
6.	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	92.785.950,00
7.	Belanja Modal Alat Kantor	3.784.013.010,00	3.352.320.869,00	88,59	556.409.649,00
8.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.583.818.803,00	2.320.947.711,00	89,83	1.257.587.800,00
9.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	359.445.000,00	316.550.200,00	88,07	475.519.000,00
10.	Belanja Modal Alat Studio	52.202.928,00	47.256.423,00	90,52	136.843.975,00
11.	Belanja Modal Alat Kedokteran	11.545.392.651,00	10.018.904.171,00	86,78	0,00
12.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	3.293.247.889,00	2.922.904.030,00	88,75	5.240.975.644,00
13.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.577.284.675,00	1.044.054.420,00	66,19	1.572.180.432,00
14.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	23.250.000,00	22.800.000,00	98,06	0,00
15.	Belanja Modal Komputer Unit	2.627.264.091,00	2.443.050.048,00	92,99	7.121.084.489,00
16.	Belanja Modal Peralatan Komputer	467.430.808,00	338.216.555,00	72,36	716.002.660,00
17.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	8991000,00
18.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	5.365.971.818,00	6.510.284.073,00	121,33	6.995.928.330,00
19.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	0,00	2.751.846.395,00
Jumlah		36.566.375.468,00	34.104.526.420,00	93,27	30.445.954.899,00

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
29.755.595.199,76	34.708.818.439,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp31.372.871.506,00 dengan realisasi sebesar Rp29.755.595.199,76 atau 94,84%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp34.708.818.439,00 realisasi anggaran Tahun 2023 turun sebesar Rp4.953.223.239,24 atau 14,27%. Belanja Modal Gedung dan Bangunan ini digunakan untuk pembangunan gedung dan bangunan baru serta perbaikan/rehab gedung dan bangunan lama sehingga dapat menambah umur ekonomis bangunan tersebut.

Tabel 5. 27. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung	28.204.871.506,00	26.725.110.718,76	94,75	34.500.465.371,00
2.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.168.000.000,00	3.030.484.481,00	95,66	112.200.000,00
3.	Belanja Modal dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00	96.153.068,00
Jumlah		31.372.871.506,00	29.755.595.199,76	94,84	34.708.818.439,00

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
119.326.461.876,00	66.520.884.059,00

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp141.886.618.480,00 dengan realisasi sebesar Rp119.326.461.876,00 atau 84,10%. Dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp66.520.884.059,00 realisasi Tahun 2023 bertambah sebesar Rp52.805.577.817,00 atau 79,38%. Belanja ini umumnya digunakan untuk pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan rutin/periodik jalan dan jembatan serta jaringan air oleh Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang.

Tabel 5. 28. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal, Jalan, Jaringan dan Irigasi

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Jalan	101.958.058.599,00	95.323.998.425,00	93,49	47.929.520.107,00
2.	Belanja Modal Jembatan	6.910.000.000,00	5.825.429.900,00	84,30	10.195.249.486,00
3.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	30.908.011.881,00	16.087.464.424,00	52,05	7.250.105.602,00
4.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	732.377.938,00
5.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	695.000.000,00	694.533.000,00	99,93	252.419.000,00
6.	Belanja Modal Jaringan Air Minum	1.209.998.000,00	1.209.355.277,00	99,95	
7.	Belanja Modal Jaringan Listrik	205.550.000,00	185.680.850,00	90,33	7.315.000,00
8.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00	153.896.926,00
Jumlah		141.886.618.480,00	119.326.461.876,00	84,10	66.520.884.059,00

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tahun 2023 (Rp) 5.105.919.323,00	Tahun 2022 (Rp) 3.411.907.103,00
---	---

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp4.922.463.523,00 dengan realisasi sebesar Rp5.105.919.323,00 atau 103,73%. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2022 yaitu sebesar Rp3.411.907.103,00 realisasi Tahun 2023 meningkat sebesar Rp1.694.012.220,00 atau 49,65%. Belanja ini digunakan untuk pengeluaran yang tidak termasuk dalam kategori empat jenis belanja modal tersebut di atas, seperti pengeluaran untuk pembelian buku, pembelian tanaman, bibit dan barang bercorak seni dan budaya.

Tabel 5. 29. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	430.957.000,00	430.949.000,00	100,00	29.958.000,00
2.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	13.000.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
3.	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces /Ikan Bersirip)	49.985.000,00	49.950.000,00	99,93	0,00
4.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	30.690.633,00
6.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	4.428.521.523,00	4.625.020.323,00	104,44	3.322.186.370,00
7.	Belanja Modal Aset Tetap lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	22.322.100,00
Jumlah		4.922.463.523,00	5.105.919.323,00	103,73	3.411.907.103,00

3. BELANJA TIDAK TERDUGA

Tahun 2023 (Rp) 1.729.558.250,00	Tahun 2022 (Rp) 616.219.436,00
---	---

Belanja Tidak Terduga tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.729.558.250,00 atau sebesar 57,65%. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga tahun 2022 yaitu sebesar Rp616.219.436,00 realisasi Tahun 2023 meningkat sebesar Rp1.113.338.814,00 atau sebesar 180,67%.

Belanja ini dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, pengembalian pendapatan tahun lalu dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

4. BELANJA TRANSFER

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
181.516.887.649,00	172.310.172.793,00

Belanja Transfer merupakan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan kepada Desa/Nagari. Belanja Transfer tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp184.557.660.848,00 dengan realisasi sebesar Rp181.516.887.649,00 atau 98,35%. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer TA 2022 yaitu sebesar Rp172.310.172.793,00 realisasi Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp9.206.714.856,00 atau 5,34%. Rincian Belanja Transfer sebagai berikut.

Tabel 5. 30. Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer

No.	Jenis	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
a.	Belanja Bagi Hasil	7.992.655.682,00	5.603.798.048,00	70,11	5.449.491.303,00
1.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	7.546.601.070,00	5.273.282.380,00	69,88	5.184.288.467,00
2.	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	446.054.612,00	330.515.668,00	74,10	265.202.836,00
b.	Belanja Bantuan Keuangan	176.565.005.166,00	175.913.089.601,00	99,63	166.860.681.490,00
1.	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	176.565.005.166,00	175.913.089.601,00	99,63	166.860.681.490,00
Total		184.557.660.848,00	181.516.887.649,00	98,35	172.310.172.793,00

a. Belanja Bagi Hasil

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.603.798.048,00	5.449.491.303,00

Belanja Bagi Hasil Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp7.992.655.682,00 dengan realisasi sebesar Rp5.603.798.048,00 atau sebesar 70,11%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp5.449.491.303,00 mengalami kenaikan sebesar Rp154.306.745,00 atau 2,83%.

1) Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.273.282.380,00	5.184.288.467,00

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp7.546.601.070,00 dengan realisasi sebesar Rp5.273.282.380,00 atau 69,88%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp5.184.288.467,00, Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp88.993.913,00 atau 1,72%.

Rincian Transfer Bagi hasil Pajak Daerah sebagai berikut:

Tabel 5. 31. Target Dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Pembayaran Kekurangan Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk 103 Pemerintah Nagari di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022, sesuai SK Bupati No.482/KEP/BPP/2023 Tanggal 6 Oktober 2023	931.461.303,00
2.	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada 103 Pemerintah Nagari Tahun 2023, berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 570/KEP/BPP/2023 Tanggal 12 Desember 2023	4.341.821.077,00
Jumlah		5.273.282.380,00

2) Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
330.515.668,00	265.202.836,00

Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp446.054.612,00 dengan realisasi sebesar Rp330.515.668,00 atau 74,10%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp265.202.836,00, Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp65.312.832,00 atau 24,63%.

Rincian Transfer Bagi hasil Retribusi Daerah sebagai berikut:

Tabel 5. 32. Target Dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Pembayaran Kekurangan Bayar Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk 103 Pemerintah Nagari di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022, sesuai SK Bupati No. 482/KEP/BPP/2023 Tanggal 6 Oktober 2023	59.530.047,00
2.	Pembayaran dana bagi hasil retribusi daerah kepada 103 pemerintah nagari tahun 2023, berdasarkan keputusan Bupati Padang Pariaman No.570/KEP/BPP/2023 Tanggal 12 Desember 2023	270.985.621,00
Jumlah		330.515.668,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
175.913.089.601,00	166.860.681.490,00

Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp176.565.005.166,00 dengan realisasi sebesar Rp175.913.089.601,00 atau 99,63%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp166.860.681.490,00, Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp9.052.408.111,00 atau 5,43%.

Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten Kota Kepada Desa sebesar Rp175.913.089.601,00 yang merupakan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten Kota Kepada Desa sebesar Rp175.913.089.601,00

yang merupakan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang terdiri dari:

1) Dana Desa (Nagari) sebesar Rp101.544.125.000,00

Dana Desa merupakan dana yang diperuntukkan bagi desa atau nagari di Kabupaten Padang Pariaman yang disalurkan kepada pemerintah Nagari yang mana mekanisme penyalurannya tidak melalui Kas Umum Daerah. Penyaluran Dana Desa langsung ditransfer dari KPPN ke rekening Desa (Nagari).

2) Alokasi Dana Nagari sebesar Rp37.780.364.601,00

Alokasi Dana Nagari merupakan Dana yang dianggarkan Pemerintah Daerah dengan yang diperuntukkan bagi Nagari sesuai peraturan perundang-undangan dan disalurkan kepada pemerintah Nagari melalui kas umum daerah.

3) SILTAP sebesar Rp36.588.600.000,00

Siltap merupakan penghasilan tetap yang diberikan kepada Wali Nagari dan Perangkatnya yang bersumber dari ADN (Anggaran Dana Nagari).

Daftar Transfer Bantuan Keuangan ke Desa di Tahun 2023, dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

C. SURPLUS / (DEFISIT)

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
(11.860.298.025,50)	33.715.539.161,86

Surplus/defisit anggaran merupakan pengurangan total pendapatan daerah dengan belanja daerah. Defisit APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp(77.763.409.395,00) dengan realisasi sebesar Rp(11.860.298.025,50) atau 15,25%.

D. PEMBIAYAAN

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
77.763.409.395,29	45.047.870.233,43

Rencana dan realisasi Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
78.763.409.395,29	46.346.870.233,43

Penerimaan Pembiayaan tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp78.763.409.395,00 dengan realisasi sebesar Rp78.763.409.395,29 atau sebesar 100%. Adapun rincian realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2023 adalah Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya sebesar Rp78.763.409.395,29 sebagai berikut:

- a. Sisa Dana Alokasi Fisik Rp10.938.725.580,00
- b. SiLPA Dana Bantuan BNPB Rp29.592.026.000,00

c. Sisa Dana Alokasi Non Fisik	Rp10.370.930.084,00
d. SiLPA Dana Transfer ke Desa/Nagari	Rp1.001.155.682,22
e. SiLPA DID Tambahan	Rp817.561.607,00
f. SiLPA BLUD	Rp5.365.365.110,82
g. SiLPA Kegiatan	Rp20.677.645.331,25
Jumlah	Rp78.763.409.395,29

2. Pengeluaran Pembiayaan

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
1.000.000.000,00	1.299.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 100%. Dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.299.000.000,00, Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp299.000.000,00 atau 23,02%.

Adapun rincian realisasi Pengeluaran Pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 33. Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Pembayaran Penyertaan Modal pada Bank Nagari	1.000.000.000,00
Jumlah		1.000.000.000,00

E. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
65.903.111.369,79	78.763.409.395,29

Selisih Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan merupakan pembiayaan neto Tahun 2023, pembiayaan neto dianggarkan sebesar Rp77.763.409.395,00 dengan realisasi sebesar Rp77.763.409.395,29.

Pembiayaan neto ditambah dengan surplus anggaran, merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Jumlah SiLPA akhir tahun 2023 sebesar Rp65.903.111.369,79. Dibandingkan dengan SiLPA Tahun 2022 sebesar Rp78.763.409.395,29 maka SiLPA Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp12.860.298.025,50 atau 16,33%.

Adapun rincian SiLPA Tahun 2023 sebesar Rp65.903.111.369,79:

Kas di Kas Daerah	Rp	50.486.009.485,29
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	312.658,00
Kas BLUD	Rp	6.651.567.236,50
Kas Bos	Rp	119.055.718,00
Kas lainnya	Rp	8.646.498.930,00
Utang PFK	Rp	(332.658,00)
Jumlah	Rp	65.903.111.369,79

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SISA LEBIH

a. Saldo Anggaran Lebih Awal

Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2023 sebesar Rp78.763.409.395,29.

b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan

Merupakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Penggunaan SAL Tahun 2023 merupakan penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp78.763.409.395,29.

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2023 sebesar Rp65.903.111.369,79.

d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya

Merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00.

e. Saldo Anggaran Lebih pada tahun 2023 sebesar Rp65.903.111.369,79. yang terdiri dari:

Tabel 5. 34. Rincian SILPA

No	Uraian	Saldo
A	DAK Fisik Reguler	
1	DAK Bidang Pendidikan	
	A DAK Pendidikan (PAUD)	7.575.001,00
	B DAK Pendidikan (SD)	753.453.720,00
	C DAK Pendidikan (SMP)	6.674.900,00
	D DAK Pendidikan (SKB)	300.197.202,00
	E DAK Pendidikan (Perpustakaan Daerah)	400,00
2	DAK Bid. Kesehatan dan KB	0,00
	A DAK Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Dasar)	1.723.076.400,00
	B DAK Kesehatan (Kesiapan Sistem Kesehatan)	18.448.000,00
	C DAK Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Rujukan)	890.913.923,00
	D DAK Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Rujukan) - Sekaligus – RSUD	0,00
	E DAK Kesehatan (Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan)	202.511.637,00
	F DAK Kesehatan (Keluarga Berencana)	9.621.734,00
3	DAK Sanitasi	5.950.000,00
4	DAK Perumahan dan Pemukiman	186.932.000,00
5	DAK Bid. Jalan (Prioritas Daerah)	1.671.695.000,00
6	DAK Air Minum	350.231.000,00
Jumlah DAK Fisik Reguler		6.127.280.917,00
B	DAK Fisik Penugasan	
1	DAK Penugasan Bid. Kesehatan (Pengendalian Penyakit)	50,00
2	DAK Penugasan Bid. Air Minum	10.797.000,00

No	Uraian	Saldo
3	DAK Penugasan Bid. Irigasi	42.557.800,00
4	DAK Penugasan Bid. Pertanian	154.709.900,00
5	DAK Penugasan Bid. Industri Kecil dan Menengah	1.354.295.270,00
6	DAK Penugasan Bid. Kelautan dan Perikanan	14.423.450,00
7	DAK Penugasan Bid. Pariwisata	67.181.972,00
8	DAK Penugasan Bid. Keselamatan Jalan	258.025.471,00
9	DAK Penugasan Bid. Jalan (Tematik Ketahanan Pangan)	2.983.402.000,00
Jumlah DAK Fisik Penugasan		4.885.392.913,00
Jumlah DAK Fisik Reguler dan Penugasan		11.012.673.830,00
C	DAK Non Fisik	
1	DAK Non Fisik (BOS REGULER)	118.739.944,00
2	DAK Non Fisik (BOS KINERJA)	315.774,00
3	DAK Non Fisik (BOP PAUD)	742.532.490,00
4	DAK Non Fisik (BOP KESETARAAN)	688.454.100,00
5	DAK Non Fisik (TPG)	3.746.842.300,00
6	DAK Non Fisik (Tamsil Guru)	1.808.250.000,00
7	DAK Non Fisik (BOK)	3.754.488.296,00
8	DAK Non Fisik (Akreditasi Puskesmas)	8.636.599.331,00
9	DAK Non Fisik (BOKT)	2.308.000,00
10	DAK Non Fisik (BOKB)	200.305.400,00
11	DAK Non Fisik (Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan)	95.186,00
12	DAK Non Fisik (Pelayanan Kepariwisataaan)	5.469.472,00
13	DAK Non Fisik (Pengawasan Obat dan Makanan)	0,00
14	DAK Non Fisik (Fasilitasi Penanaman Modal)	8.819.500,00
15	DAK Non Fisik (Ketahanan Pangan dan Pertanian)	6.276.010,00
16	DAK Non Fisik PK2UKM	8.905.700,00
Jumlah DAK Non Fisik		19.728.401.503,00
Total DAK		30.741.075.333,00
D	Diluar DAK	
1	DAU Bidang Pendidikan	6.574.896.490,00
2	DAU Bidang Kesehatan	2.031.564.965,00
3	DAU Bidang Pekerjaan Umum	3.321.324.408,00
4	PPPK	62.533.421.724,00
5	SiLPA Dana Bantuan BNPB	14.952.850.841,00
6	SiLPA Dana Transfer ke Desa/Nagari	1.944.559.317,80
7	SiLPA DID Tambahan	817.561.607,00
8	SiLPA BLUD	6.651.567.236,50
Jumlah SiLPA Diluar DAK		98.827.746.589,30
Total SiLPA		129.568.821.922,30
SiLPA pada Onface		65.903.111.369,79
Selisih		63.665.710.552,51

Nilai rincian Saldo Anggaran Lebih tahun 2023 sebesar Rp129.568.821.922,30 nilai Saldo Anggaran Lebih tahun 2023 pada *onface* sebesar Rp65.903.111.369,79 terdapat perbedaan sebesar Rp63.665.710.552,51. Hal tersebut terjadi karena adanya SiLPA dana DAU peruntukan yang terpakai yang terdiri dari DAU Penggajian PPPK sebesar Rp62.533.421.724,00, dan DAU Bidang pendidikan sebesar Rp1.132.288.828,51 yang digunakan untuk pembayaran belanja Tambahan Penghasilan Pegawai, pembayaran belanja barang dan jasa serta belanja modal atas kegiatan yang sudah dikontrakkan.

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2023 dengan total nilai Aset sebesar Rp1.325.976.099.528,70, Kewajiban sebesar Rp8.123.791.387,72 dan Ekuitas sebesar Rp1.317.852.308.140,98.

Rincian masing-masing pos di Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut.

A. ASET LANCAR

Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
129.845.806.633,73	118.051.118.283,61

Aset Lancar adalah Kas dan Setara Kas yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai untuk dimiliki atau dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal pelaporan. Pada tanggal 31 Desember 2023 Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berjumlah Rp129.845.806.633,73 yang terdiri atas:

1. Kas di Kas Daerah

Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
50.486.009.485,29	73.254.300.095,47

Saldo Kas Daerah pembukuan per 31 Desember 2023 sebesar Rp50.486.009.485,29 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp73.254.300.095,47. Sedangkan pada rekening koran Kas Umum Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp50.875.313.027,44 yang disimpan di Rekening Kas Umum Daerah Nomor 1700.0101.00052.9 Bank Nagari Cabang Lubuk Alung, sehingga terdapat selisih sebesar Rp389.303.542,15 dengan rincian sebagai berikut:

Penerimaan Kota Pariaman (2016)	Rp	811.000,00
Kurang Catat SP2D No. 1681 oleh Bank (2016)	Rp	8,00
Lebih Catat Saldo Awal oleh Bank (2016)	Rp	0,06
Koreksi PBB Pajak Yang di Potong Bank (2016)	Rp	20,00
Pajak Yang Dipotong Bank (2016)	Rp	(339,00)
Pajak Yang Dipotong Bank (2017)	Rp	32.336,00
Kas yang dibatasi penggunaannya atas jaminan reklamasi yang sudah direklas ke aset lain-lain.	Rp	41.824.407,00
Kesalahan bank dalam mencairkan 0222/sp2d-ls/gj/bud/2022 sebesar Rp600,00	Rp	600,00
Kurang Potong Bank atas SP2D Nomor 6020	Rp	344.850,00
SP2D Nomor 7217 tahun 2023 terpotong 2 kali	Rp	(1.980.000,00)

SP2D Nomor 8233 tahun 2023 terpotong 2 kali	Rp	(1.380.000,00)
SP2D Nomor 9078 tahun 2023 terpotong 2 kali	Rp	(975.000,00)
SP2D Nomor 9901 tahun 2023 terpotong 2 kali	Rp	(198.000,00)
Kekurangan debit kas daerah oleh Bank	Rp	33.211.025,27
Outstanding Cek	Rp	317.612.634,82
Jumlah	Rp	389.303.542,15

Rincian penjelasan kekurangan debit kasda dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
312.658,00	12.703,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp312.658,00 sedangkan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.703,00. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp312.658,00 merupakan utang PPN yang belum disetorkan oleh bendahara PUPR ke Kas Negara.

Selain itu pada rekening Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 masih terdapat uang sebesar Rp104.901.928,50 yang merupakan uang yang telah keluar dari Kas Daerah namun terlambat disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran ke penerima yang berhak dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp96.741.928,50 terdiri atas:
 - 1) Kas di Bendahara Pengeluaran pada Puskesmas Sicincin sebesar Rp0,50 yang merupakan kekurangan transfer TPP ASN;
 - 2) Kas di Bendahara Puskesmas Sintuk sebesar Rp72.907.970,00 yang merupakan TPP ASN yang belum ditransfer oleh bendahara;
 - 3) Kas di Bendahara Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar Rp6.101.810,00 yang merupakan TPP ASN yang belum ditransfer oleh bendahara;
 - 4) Kas di Bendahara IFK sebesar Rp6.614.741,00 yang merupakan TPP ASN yang belum ditransfer oleh bendahara;
 - 5) Kas di Bendahara Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam sebesar Rp2.407,00 merupakan jasa giro yang belum didebit oleh bank;
 - 6) Kas di Bendahara Dinas Perhubungan Rp11.115.000,00 merupakan insentif retribusi daerah yang belum disetorkan oleh bendahara.
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu sebesar Rp8.160.000,00 yang terdiri dari:
 - 1) Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat sebesar Rp7.500.000, yang merupakan sewa gedung;

- 2) Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan sebesar Rp660.000 yang merupakan uang perjalanan dinas ASN yang belum ditransfer oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.

3. Kas di BLUD

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
6.651.567.236,50	5.365.365.110,82

Kas di BLUD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp6.651.567.236,50 dan Rp5.365.365.110,82 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 35. Rincian Kas di BLUD

No.	Uraian	Saldo Akhir (Rp)	Rincian Saldo Akhir (Rp)	
			Bank	Tunai
1.	Puskesmas Anduring	0,00	0,00	0,00
2.	Puskesmas Batu Basa	3.724.314,00	3.724.314,00	0,00
3.	Puskesmas Gasan Gadang	0,00	0,00	0,00
4.	Puskesmas Ketaping	39.087,00	39.087,00	0,00
5.	Puskesmas Kampung Dalam	25.090.770,00	25.090.770,00	0,00
6.	Puskesmas Kampung Guci	5.346.685,00	5.346.685,00	0,00
7.	Puskesmas Koto Bangko	0,00	0,00	0,00
8.	Puskesmas Kayu Tanam	0,00	0,00	0,00
9.	Puskesmas Limau Purut	0,00	0,00	0,00
10.	Puskesmas Lubuk Alung	34.871.311,00	34.871.311,00	0,00
11.	Puskesmas Padang Alai	7.727.708,00	7.727.708,00	0,00
12.	Puskesmas Padang Sago	3.532.570,00	3.532.570,00	0,00
13.	Puskesmas Enam Lingkung	0,00	0,00	0,00
14.	Puskesmas Pasar Usang	16.624.280,00	16.624.280,00	0,00
15.	Puskesmas Patamuan	0,00	0,00	0,00
16.	Puskesmas Sungai Geringging	0,00	0,00	0,00
17.	Puskesmas Sungai Limau	18.644.712,00	18.644.712,00	0,00
18.	Puskesmas Sungai Sarik	0,00	0,00	0,00
19.	Puskesmas Sicincin	17.319.544,00	17.319.544,00	0,00
20.	Puskesmas Sikabu	16.195.654,00	16.195.654,00	0,00
21.	Puskesmas Sintuak	0,00	0,00	0,00
22.	Puskesmas Ulakan	22.073.954,00	22.073.954,00	0,00
23.	Puskesmas Pauh Kamar	0,00	0,00	0,00
24.	Puskesmas Ampalu	0,00	0,00	0,00
25.	Puskesmas Sikucur	0,00	0,00	0,00
26.	RSUD	6.480.376.647,50	6.480.376.647,50	0,00
Jumlah		6.651.567.236,50	6.651.567.236,50	0,00

4. Kas di Bendahara BOS

Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
119.055.718,00	143.751.486,00

Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp119.055.718,00 dan Rp143.751.486,00. Saldo Kas sebesar Rp119.055.718,00 terdiri dari Kas di Bank sebesar Rp72.453.863,00 dan Kas Tunai sebesar Rp46.601.855,00 yang dikelola oleh Sekolah SD dan SMP. Rincian Kas di Bendahara BOS dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

5. Kas Lainnya

Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
8.646.498.930,00	0,00

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp8.646.498.930,00 dan Rp0,00. Saldo kas lainnya sebesar Rp8.646.498.930,00 merupakan saldo kas yang berasal dari SiLPA DAK Non Fisik BOK Puskesmas sebesar Rp8.636.598.930,00 dan SiLPA dana BOP PAUD sebesar Rp9.900.000,00.

6. Piutang Pajak Daerah

Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
57.349.860.172,00	47.004.150.766,00

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp57.349.860.172,00 dan Rp47.004.150.766,00 dengan terdiri sebagai berikut:

Tabel 5. 36. Piutang Pajak Daerah

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
1.	Piutang Pajak Reklame	64.389.300,00
2.	Piutang Pajak Air Tanah	51.321.664,00
3.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	57.234.149.208,00
Jumlah		57.349.860.172,00

a. Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2023 sebesar Rp64.389.300,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2022	Rp	61.568.550,00
Surat Ketetapan Pajak (SKP) 2023	Rp	952.925.156,00
Penerimaan 2023	Rp	<u>(950.104.406,00)</u>
Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2023	Rp	64.389.300,00

Rincian Piutang Pajak Reklame per Wajib Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 5a**.

- b. Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp51.321.664,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2022	Rp	90.550.307,00
Surat Ketetapan Pajak (SKP) 2023	Rp	1.452.687.749,00
Penerimaan Pajak Air Tanah tahun 2023	<u>Rp</u>	<u>(1.491.916.392,00)</u>
Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2023	Rp	51.321.664,00

Rincian Piutang Pajak Air Tanah per wajib pajak sebagai berikut:

Tabel 5. 37. Piutang Pajak Air Tanah

No.	Wajib Pajak	Tahun	Jumlah (Rp)
1.	PT. Kunango Jantan	2015	157.534,00
2.	PT. Beta Farma	2015	100.000,00
3.	PT. Anugrah Jaya Mandiri	2016	281.634,00
4.	PT. Buana Lestari	2017	1.663.506,00
5.	PT. Japfa Comfeed KY.TNM	2017	40,00
6.	PT. Trisuri Indah Farm	2018	2.960.770,00
7.	PT. Multikon Jagad Perkasa	2020	437.964,00
8.	PT. Usaha Inti Padang	2020	685,00
9.	PT. Usaha Inti Padang	2021	270,00
10.	PT. Multikon Jagad Perkasa	2023	1.382.932
11.	PT. Kunango Jantan	2023	6.002.646
12.	PT. Multikon Jagad Perkasa	2023	1.382.932
13.	PT. Multikon Jagad Perkasa	2023	1.382.932
14.	PT. Multikon Jagad Perkasa	2023	1.382.932
15.	PT. Multikon Jagad Perkasa	2023	1.382.932
16.	PT. Multikon Jagad Perkasa	2023	1.382.932
17.	PT. Multikon Jagad Perkasa	2023	1.382.932
18.	PT. Nindya Beton	2023	2.336.718
19.	PT. Nindya Beton	2023	2.336.718
20.	PT. Kunango Jantan	2023	6.002.646
21.	PT. Nindya Beton	2023	2.336.718
22.	PT. Kunango Jantan	2023	6.002.646
23.	PT. Nindya Beton	2023	2.336.718
24.	PT. Kunango Jantan	2023	6.002.646
25.	PT. Nusantara Beta Farma	2023	344.563
26.	PT. Nindya Beton	2023	2.336.718
Jumlah			51.321.664,00

- c. Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp57.234.149.208,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Saldo Piutang PBB P2 per 31 Desember 2022	Rp	46.852.031.909,00
Surat Ketetapan Pajak (SKP) 2023	Rp	24.453.307.091,00
Penerimaan Pajak PBB Tahun 2023	Rp	(14.431.339.363,00)
Koreksi Saldo Awal (kurang Catat) Piutang PBBP2	Rp	360.149.571,00
Saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2023	Rp	57.234.149.208,00

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Rp57.234.149.208,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Piutang PBB-P2 tahun 2009 s.d. 2013 diserahkan oleh Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang ke Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan:
 - a) Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan Data Piutang PBB-P2 dan Aset Sitaan Nomor BA-23/WPJ.27/KP.04/2013 tanggal 19 Desember 2013;
 - b) Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan Data Piutang PBB-P2 dan Aset Sitaan Nomor BA-07/WPJ.27/KP.04/2014, tanggal 24 Januari 2014. Berdasarkan BAST tersebut piutang PBB P2 yang dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp18.198.672.111,00.
- 2) Piutang PBB P2 tahun 2009 sampai dengan 2022 per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 38. Piutang PBB P2

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Piutang PBBP2 Tahun 2009	2.843.675.290,00
2.	Piutang PBBP2 Tahun 2010	2.911.173.985,00
3.	Piutang PBBP2 Tahun 2011	4.152.722.763,00
4.	Piutang PBBP2 Tahun 2012	3.717.761.420,00
5.	Piutang PBBP2 Tahun 2013	4.573.338.653,00
6.	Piutang PBBP2 Tahun 2014	2.454.671.516,00
7.	Piutang PBBP2 Tahun 2015	2.243.576.013,00
8.	Piutang PBBP2 Tahun 2016	2.282.973.867,00
9.	Piutang PBBP2 Tahun 2017	2.263.534.686,00
10.	Piutang PBBP2 Tahun 2018	2.845.917.530,00
11.	Piutang PBBP2 Tahun 2019	3.810.447.369,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
12.	Piutang PBBP2 Tahun 2020	3.909.417.338,00
13.	Piutang PBBP2 Tahun 2021	3.660.442.370,00
14.	Piutang PBBP2 Tahun 2022	4.109.202.019,00
14.	Piutang PBBP2 Tahun 2023	11.455.313.161,00
Jumlah		57.234.167.980,00

Bila dibandingkan dengan nilai piutang PBB sebesar Rp57.234.149.208,00 dengan rincian piutang PBB sebesar Rp57.234.167.980,00 terdapat selisih sebesar Rp18.772,00. hal ini terjadi karena adanya perbedaan nilai antara simda dengan aplikasi PBB. Rincian Piutang PBB P2 dapat dilihat pada **Lampiran 5b**.

7. Piutang Retribusi Daerah

Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
836.782.650,00	572.032.650,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp836.782.650,00 dan Rp572.032.650,00. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp836.782.650,00 merupakan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp745.032.650,00 dan Piutang Retribusi Pelayanan Sampah sebesar Rp91.750.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 39. Piutang Retribusi

No.	Uraian	Jumlah
1.	PT. Centratama Menara berdasarkan SKRD Tahun 2020, 2021 dan 2023	94.000.000,00
2.	PT. Akses Prima Indonesia berdasarkan SKRD Tahun 2019, 2020 dan 2021	14.250.000,00
3.	PT. Tower Bersama Group (TBG) berdasarkan SKRD tahun 2021	2.500.000,00
4.	PT. Mega Tower berdasarkan SKRD tahun 2015, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2023	63.060.729,00
5.	PT. XL Axiata berdasarkan SKRD tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2023	142.500.000,00
6.	PT. Solusi Tunas Pratama berdasarkan SKRD tahun 2020, 2021 dan 2023	67.250.000,00
7.	PT. Infrasyas Persada berdasarkan SKRD tahun 2015, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2023	22.284.263,00
8.	PT. Indosat berdasarkan SKRD tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2023	134.500.000,00
9.	PT. Telkomsel berdasarkan SKRD tahun 2013, 2018, 2019, 2020 dan 2021	6.937.658,00

Piutang Dana BOS berasal dari Dana BOS yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp10.205.767,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo atas Piutang Dana BOS per 31 Desember 2022	Rp	10.205.767,00
Bunga Dana BOS Tahun 2022	Rp	50.224.052,00
Penerimaan Bunga BOS di Kas Daerah Tahun 2022	Rp	(50.224.052,00)
Saldo Piutang Bunga Bos per 31 Desember 2022	Rp	10.205.767,00

Saldo Piutang Dana Bos sebesar Rp10.205.767,00 merupakan pendapatan bunga Dana BOS dari tahun 2018 sampai dengan 2023 yang belum disetorkan ke kas daerah dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Bunga Dana BOS tahun 2018	Rp	6.725.500,00
Piutang Bunga Dana BOS tahun 2019	Rp	2.121.323,00
Piutang Bunga Dana BOS tahun 2020	Rp	783.159,00
Piutang Bunga Dana BOS tahun 2021	Rp	575.785,00
Piutang Bunga Dana BOS tahun 2022	Rp	0,00
Piutang Bunga Dana BOS tahun 2023	Rp	0,00
Saldo Piutang Bunga BOS per 31 Desember 2022	Rp	10.205.767,00

9. Piutang Transfer Antar Daerah

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
26.337.599.443,00	11.461.697.483,00

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp26.337.599.443,00 dan Rp11.461.697.483,00 Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2023 merupakan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5. 41. Piutang Transfer Antar Daerah

No.	Jenis DBH Provinsi	Kurang Salur per 31 Des 2022 (Rp)
1.	PKB	4.980.163.352,00
2.	BBNKB	2.302.874.802,00
3.	PBBKB	16.200.211.351,00
4.	PAP	32.051.005,00
5.	Pajak Rokok	2.822.298.933,00
Jumlah		26.337.599.443,00

Keputusan atas Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor:971.1/06/Pjk-Bapenda/2023 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat TA 2023.

10. Piutang Lainnya

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
11.140.305,00	11.140.305,00

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp11.140.305,00 dan Rp11.140.305,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Reklas atas kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 ke Kas Negara di Tahun 2011 sebesar Rp3.040.305,00 ke Piutang Lainnya; dan
- b. Reklas Tagihan Ganti Rugi sebesar Rp8.100.000,00 ke Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Rincian Tagihan Ganti Rugi sebagai berikut:

No.	Tahun	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Tahun 2019	Piutang TGR ke Darfa Yenil	2.900.000,00
2.		Piutang TGR ke Nailus	250.000,00
3.	Tahun 2021	Piutang TGR ke By .Kenek	350.000,00
4.	Tahun 2022	Piutang TGR a.n. Qorri Suti Armi, A.Md.Keb	4.600.000,00

11. Penyisihan Piutang

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
(36.869.449.426,71)	(33.464.276.708,82)

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp(36.869.449.426,71) dan Rp(33.464.276.708,82) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 42. Penyisihan Piutang

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	56.736.378,75
2.	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	5.611.539,81
3.	Penyisihan Piutang PBB P2	36.148.965.739,56
4.	Penyisihan Piutang Retribusi	507.051.983,50
5.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	13.030.482,87
6.	Penyisihan Piutang Antar daerah	131.687.997,22
7.	Penyisihan Piutang Lainnya	6.365.305,00
Jumlah		36.869.449.426,71

12. Beban Bayar Dimuka

Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
207.989.718,75	0,00

Saldo Beban Bayar Dimuka Per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp207.989.718,75 dan Rp0,00. Beban Bayar Dimuka merupakan Sewa Bayar Dimuka atas lahan untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sesuai dengan perjanjian sewa menyewa lahan Nomor 06/PSML/DLHKPP/IX/2023.

13. Persediaan

Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
15.879.033.952,90	13.589.991.987,94

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp15.879.033.952,90 dan Rp13.589.991.987,94 Persediaan per 31 Desember 2023 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 43. Rincian Persediaan per jenis

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Persediaan Bahan	8.082.765,00
2.	Persediaan Suku Cadang	19.415.249,00
3.	Alat/bahan untuk kegiatan kantor	751.242.978,00
4.	Obat-obatan	15.095.792.960,90
5.	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	4.500.000,00
Jumlah		15.879.033.952,90

Rincian Persediaan Per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

Selain persediaan yang tercatat di atas, juga terdapat obat kadaluarsa sebesar Rp92.354.628,44 dengan rincian pada Dinas Kesehatan sebesar Rp32.456.766,29 dan di RSUD sebesar Rp59.897.862,15, disamping juga terdapat Bahan Habis Pakai (Bahan Kimia) kadaluarsa sebesar Rp404.219.476,85 dengan rincian pada RSUD sebesar Rp394.951.426,85 dan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp9.268.050,00.

B. INVESTASI JANGKA PANJANG

Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
91.576.556.216,69	94.766.691.331,09

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang dilaksanakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp91.576.556.216,69 dan Rp94.766.691.331,09 berupa Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 44. Investasi Jangka Panjang

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)	4.232.465.232,00
2.	Penyisihan Investasi Non Permanen	(4.232.465.232,00)
3.	Investasi Permanen	91.576.556.216,69
Jumlah		91.576.556.216,69

Investasi jangka Panjang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)

Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
4.232.465.232,00	4.232.465.232,00

Saldo per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp4.232.465.232,00 dan Rp4.232.465.232,00.

2. Penyisihan Investasi Non Permanen

Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
(4.232.465.232,00)	(4.232.465.232,00)

Jumlah tersebut merupakan Penyisihan Investasi Non Permanen yang kemungkinan tidak tertagih yang diperoleh melalui *aging schedule*. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 Penyisihan Piutang Non Permanen telah mencapai nilai maksimal dari nilai Investasi Non Permanen. Rincian Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

3. Investasi Permanen

Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
91.576.556.216,69	94.766.691.331,09

Investasi Permanen merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah. Saldo per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-

masing adalah sebesar Rp91.576.556.216,68 dan Rp94.766.691.331,09. Rincian Investasi Permanen dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

Rincian Penyertaan modal tersebut adalah sebagai berikut

Tabel 5. 45. Penyertaan Modal Daerah

No	Uraian	Jumlah (Rp)																																																						
1.	Bank Nagari Sumatera Barat	43.941.000.000,00																																																						
	Per 31 Desember 2020 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada Bank Nagari Sumatera Barat Rp43.941.000.000,00. Dari jumlah penyertaan modal sebesar Rp43.941.000.000,00 telah dikonversikan menjadi lembar saham dengan jumlah lembar sebanyak 42.941 lembar. Persentase penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman per 31 Desember 2023 sebesar 2.37%. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada Bank Nagari Sumatera Barat Rp43.941.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut: Saldo awal penyertaan modal tahun 2022 sebesar Rp42.941.000.000,00 Tambahkan Penyertaan modal tahun 2023 sebesar Rp 1.000.000.000,00 Nilai Penyertaan Modal akhir Rp43.941.000.000,00																																																							
2.	PDAM	37.391.897.458,22																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kekayaan Pemda yang dipisahkan</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Tahun 1995</td> <td>5.792.864.988</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Tahun 2002</td> <td>1.185.764.899</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Tahun 2004</td> <td>1.608.778.000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Tahun 2005</td> <td>48.444.000</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Tahun 2006</td> <td>1.773.800.000</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Tahun 2007</td> <td>1.827.799.300</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Tahun 2013</td> <td>1.812.459.000</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Nomor : PHD-08/PK/2016, tentang Hibah Air Minum (MBR)</td> <td>1.276.000.000</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Perda Kab. Padang Pariaman No 11 Tahun 2016, modal non tunai untuk skema penghapusan utang PDAM Kab. Padang Pariaman kepada Pemerintah Pusat</td> <td>52.254.085.000</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2017, Tanggal 15 Maret 2017, Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai Kabupaten Padang Pariaman</td> <td>6.945.000.000</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Perjanjian Hibah Daerah No PHD-14/AMK/MK7/2018, Tanggal 23 Mei 2018 berupa pemasangan 2.546 Sambungan Rumah baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)</td> <td>7.638.000.000</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>Perjanjian Hibah Daerah No PHD-136/MK7/2019, Tanggal 5 Agustus 2019 berupa pemasangan 2.720 Sambungan Rumah baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)</td> <td>8.160.000.000</td> </tr> <tr> <td>13.</td> <td>Perjanjian Hibah Daerah Nomor : PHD-91/MK7/DTK03/AMK/2021, Tanggal 4 Mei 2021 berupa pemasangan 2.487 Sambungan Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)</td> <td>7.461.000.000</td> </tr> <tr> <td>14.</td> <td>Perjanjian Hibah Daerah Nomor : PHD-5/MK.7/DTK.03/AMK/2022, Tanggal 11 Februari 2022 berupa pemasangan 481 Sambungan Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)</td> <td>1.299.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah Penyertaan Modal</td> <td>99.082.995.187</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Modal yang Belum ditetapkan Statusnya</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pemda Tingkat II</td> <td>22.471.978.920</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kekayaan Pemda yang dipisahkan	Jumlah	1.	Tahun 1995	5.792.864.988	2.	Tahun 2002	1.185.764.899	3.	Tahun 2004	1.608.778.000	4.	Tahun 2005	48.444.000	5.	Tahun 2006	1.773.800.000	6.	Tahun 2007	1.827.799.300	7.	Tahun 2013	1.812.459.000	8.	Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Nomor : PHD-08/PK/2016, tentang Hibah Air Minum (MBR)	1.276.000.000	9.	Perda Kab. Padang Pariaman No 11 Tahun 2016, modal non tunai untuk skema penghapusan utang PDAM Kab. Padang Pariaman kepada Pemerintah Pusat	52.254.085.000	10.	Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2017, Tanggal 15 Maret 2017, Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai Kabupaten Padang Pariaman	6.945.000.000	11.	Perjanjian Hibah Daerah No PHD-14/AMK/MK7/2018, Tanggal 23 Mei 2018 berupa pemasangan 2.546 Sambungan Rumah baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	7.638.000.000	12.	Perjanjian Hibah Daerah No PHD-136/MK7/2019, Tanggal 5 Agustus 2019 berupa pemasangan 2.720 Sambungan Rumah baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	8.160.000.000	13.	Perjanjian Hibah Daerah Nomor : PHD-91/MK7/DTK03/AMK/2021, Tanggal 4 Mei 2021 berupa pemasangan 2.487 Sambungan Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	7.461.000.000	14.	Perjanjian Hibah Daerah Nomor : PHD-5/MK.7/DTK.03/AMK/2022, Tanggal 11 Februari 2022 berupa pemasangan 481 Sambungan Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	1.299.000.000		Jumlah Penyertaan Modal	99.082.995.187		Modal yang Belum ditetapkan Statusnya			Pemda Tingkat II	22.471.978.920	
No	Kekayaan Pemda yang dipisahkan	Jumlah																																																						
1.	Tahun 1995	5.792.864.988																																																						
2.	Tahun 2002	1.185.764.899																																																						
3.	Tahun 2004	1.608.778.000																																																						
4.	Tahun 2005	48.444.000																																																						
5.	Tahun 2006	1.773.800.000																																																						
6.	Tahun 2007	1.827.799.300																																																						
7.	Tahun 2013	1.812.459.000																																																						
8.	Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Nomor : PHD-08/PK/2016, tentang Hibah Air Minum (MBR)	1.276.000.000																																																						
9.	Perda Kab. Padang Pariaman No 11 Tahun 2016, modal non tunai untuk skema penghapusan utang PDAM Kab. Padang Pariaman kepada Pemerintah Pusat	52.254.085.000																																																						
10.	Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2017, Tanggal 15 Maret 2017, Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai Kabupaten Padang Pariaman	6.945.000.000																																																						
11.	Perjanjian Hibah Daerah No PHD-14/AMK/MK7/2018, Tanggal 23 Mei 2018 berupa pemasangan 2.546 Sambungan Rumah baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	7.638.000.000																																																						
12.	Perjanjian Hibah Daerah No PHD-136/MK7/2019, Tanggal 5 Agustus 2019 berupa pemasangan 2.720 Sambungan Rumah baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	8.160.000.000																																																						
13.	Perjanjian Hibah Daerah Nomor : PHD-91/MK7/DTK03/AMK/2021, Tanggal 4 Mei 2021 berupa pemasangan 2.487 Sambungan Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	7.461.000.000																																																						
14.	Perjanjian Hibah Daerah Nomor : PHD-5/MK.7/DTK.03/AMK/2022, Tanggal 11 Februari 2022 berupa pemasangan 481 Sambungan Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	1.299.000.000																																																						
	Jumlah Penyertaan Modal	99.082.995.187																																																						
	Modal yang Belum ditetapkan Statusnya																																																							
	Pemda Tingkat II	22.471.978.920																																																						

	Pemerintah Pusat	5.548.542.465	
	Jumlah Modal yang Belum ditetapkan Statusnya		28.020.521.385
	Modal Hibah		1.592.016.000
	Total Modal PDAM		128.695.532.572
	Persentase Kepemilikan Pemda atas PDAM (99.082.995.187 /128.695.532.572)	76,99	
	Akumulasi kerugian sesuai Laporan Keuangan PDAM		
	Laba Ditahan (Akumulasi Rugi) Saldo Awal	(75.517.369.644,00)	
	Koreksi Laba Ditahan	808.292.745	
	Rugi Tahun Berjalan 2023	(5.419.391.787,00)	
	Akumulasi Kerugian Sampai dengan 31 Desember 2023	(80.128.468.686,00)	
	Akumulasi Kerugian Sampai dengan 31 Desember 2023 yang di tanggung Pemda		(61.691.097.728,78)
	Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tahun 2023		37.391.897.458,22
3.	PT. BPR-PKPP		7.318.759.758,46
	Nilai Modal Disetor PT.BPR -PKPP	6.771.500.000,00	
	Setoran Modal Pemerintah Daerah		
	Setoran Awal Pendirian PT.BPR-PKPP Tahun 2007		750.000.000,00
	Tambahan Setoran Modal Tahun 2009		250.000.000
	Tambahan Setoran Modal Tahun 2015		2.000.000.000,00
	Tambahan Setoran Modal Tahun 2016		500.000.000,00
	Tambahan Setoran Modal Tahun 2017		1.000.000.000,00
	Tambahan Setoran Modal Tahun 2018		1.500.000.000,00
	Tambahan Setoran Modal Tahun 2020		750.000.000,00
	Nilai Setoran Modal Pemda		6.750.000.000,00
	persentase kepemilikan Pemda (6.750.000.000/6.771.500.000x100)	99,68	
	Cadangan Umum		
	Cadangan Umum Sampai Dengan Akhir Tahun 2023	333.367.116,00	
	Cadangan Umum tahun 2023	49.526.654,00	
	Total Nilai Cadangan		382.893.770,00
	Jumlah Modal sebelum Pembagian Laba		7.132.893.770,00
	Nilai Pembagian Laba		
	Laba Tahun 2023	186.462.669,00	
	Deviden Tahun 2023	(186.462.669x99,68)	185.865.988,46
	JUMLAH		7.318.759.758,46
4.	KUD Dwi Sri		100.000.000,00
	Penyertaan modal pada KUD Dwi Sri dengan nilai perolehan (<i>cost method</i>) sebesar Rp100.000.000,00. KUD Dwi Sri sejak beberapa tahun belakang tidak lagi melakukan aktivitas dan secara manajemen tidak ada lagi penanggung jawabnya. Sehingga sampai dengan penyusunan laporan keuangan Tahun 2020 laporan keuangan KUD Dwi Sri tidak diperoleh.		

Tabel 5. 46. Aset Tetap

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Tanah	213.088.316.749,00
2.	Peralatan dan Mesin	478.877.100.278,58
3.	Gedung dan Bangunan	1.081.759.974.520,61
4.	Jalan, Jembatan Jaringan dan Irigasi	2.566.695.708.812,05
5.	Aset Tetap Lainnya	90.073.340.927,35
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	83.838.743.955,20
Total Aset Tetap Sebelum Penyusutan		4.514.333.185.242,79

1. Tanah

Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
213.088.316.749,00	210.556.816.749,00

Nilai tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp213.088.316.749,00 terdiri atas:

Saldo Awal	Rp 210.556.816.749,00
▪ Penilaian (+)	Rp 718.250.000,00
▪ Tukar Menukar (+)	Rp 1.834.300.000,00
▪ Penghapusan (-)	Rp 21.050.000,00
Saldo akhir	Rp 213.088.316.749,00

Penambahan Aset Tanah sebesar Rp2.552.550.000,00 dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Hasil penilaian berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah sebesar Rp718.250.000,00 pada:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SMPN 2 Padang Sago, SMPN 4 2X11 Kayu Tanam dan SMPN 4 IV Koto Aur Malintang) dengan nilai sebesar Rp118.250.000,00. Tanah tersebut berasal dari hibah masyarakat;
 - 2) Dinas Kesehatan berupa tanah pada Puskesmas Ketaping senilai Rp600.000.000,00. Tanah ini merupakan hibah dari Nagari Ketaping seluas 3.000m² dengan NJOP Rp20.000,00 per meter.
- b. Tukar Menukar tanah BPP Buayan dengan Kementerian PUPR seluas 12.000m² dalam rangka mendukung proyek strategis nasional (Pembangunan Jalan Tol Padang – Kapalo Hilalang) senilai Rp1.834.300.000,00.

Pengurangan Aset Tanah sebesar Rp21.050.000,00 merupakan penghapusan atas koreksi lebih catat aset tanah seluas 2105 m² pada BPP Buayan akibat adanya pengukuran ulang saat pertukaran aset tanah dengan Kementerian

PUPR dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional (Pembangunan Jalan Tol Padang – Kapalo Hilalang).

Kemudian nilai tanah Tahun 2023 sebesar Rp211.275.066.749,00 secara ruas adalah sebanyak 1.463 persil tanah yang terdiri dari 362 persil tanah telah bersertifikat, 9 persil tanah dalam proses sertifikat dan 1.092 persil tanah belum bersertifikat yang diantaranya termasuk tanah jalan sebanyak 741 persil tanah. Diantara 1.092 persil tanah yang belum bersertifikat tersebut di atas terdapat tanah Taman Kehati seluas 10.000m² yang tergabung dalam tanah IKK dan tanah SDN 06 Batang Anai seluas 1.000m², saat ini kedua bidang tanah tersebut sedang dalam proses hukum yang dapat berdampak terhadap status kepemilikan tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman apabila keluar keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Selanjutnya untuk penggantian tanah BPP Buayan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang terdampak pembangunan jalan tol seluas ±12.000m² dalam proses pengurusan Sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Rincian lebih lanjut tentang aset Tanah dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

2. Peralatan dan Mesin

	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	478.877.100.278,58	466.957.311.323,41
Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp478.877.100.278,58 terdiri:		
Saldo Awal		Rp 466.957.311.323,41
a. Belanja Modal 2023 (+)		Rp 34.104.526.420,00
b. Hibah dari pihak ketiga (+)		Rp 875.126.485,00
c. Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin (+)		Rp 256.483.000,00
d. Penghapusan (-)		Rp (20.389.182.329,83)
e. Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin (-)		Rp (2.927.164.620,00)
	Saldo akhir	Rp 478.877.100.278,58

Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp34.104.526.420,00 adalah berdasarkan LRA Tahun 2023.
- b. Hibah dari Pihak Ketiga sebesar Rp875.126.485,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Hibah dari Komite kepada sekolah-sekolah di Rp 43.450.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- 2) Hibah peralatan untuk ruang Command Center dari PLN ICON PLUS ke Dinas Komunikasi dan Informatika Padang Pariaman dengan tanggal BAST 12 September 2023. Rp 688.441.960,00
 - 3) Hibah Sepeda Motor dari Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri ke Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (BAST Nomor : 000.3.4/4692/BAK tanggal 30 Agustus 2023. Rp 45.234.525,00
 - 4) Hibah Peralatan berupa UPS, PC.Unit, Router dan Genset dari Badan Penanggulangan Bencana ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BAST Nomor. 041/BMN-IDRIP-INVENT/ PUSDALOPS/ BNPB/12/ 2022) Rp 98.000.000,00
- c. Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp256.483.000,00 terdiri dari:
- 1) Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan terdapat pembelian alat TIK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Rp 249.490.000,00
 - 2) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa berupa Pembelian Mesin Pompa Air pada Inspektorat Kabupaten. Rp 6.993.000,00

Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penghapusan senilai Rp20.389.182.329,83 merupakan penghapusan aset Peralatan dan Mesin sesuai Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor:510/KEP/BPP/2023, Nomor:512/KEP/BPP/2023 dan Nomor:559/KEP/BPP/2023 dengan rincian:
 - a) Sekretariat Daerah sebesar Rp389.000.000,00;
 - b) Sekretariat DPRD sebesar Rp1.145.158.706,34;
 - c) Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp429.499.700,00;
 - d) Inspektorat Daerah sebesar Rp40.727.000,00;
 - e) Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia sebesar Rp122.969.600,00;
 - f) Kecamatan Lubuk Alung sebesar Rp16.993.000,00;
 - g) Kecamatan Sungai Geringging sebesar Rp10.000.000,00;
 - h) Kecamatan Sungai Limau sebesar Rp76.451.000,00;
 - i) Kecamatan V Koto Kampung Dalam sebesar Rp54.950.000,00;
 - j) Kecamatan VII Koto Sei.Sariak sebesar Rp31.573.800,00;
 - k) Kecamatan 2x11 Enam Lingkung sebesar Rp18.510.725,00;
 - l) Kecamatan Patamuan sebesar Rp6.649.300,00;
 - m) Kecamatan Sintuk Toboh Gadang sebesar Rp20.383.250,00;
 - n) Kecamatan Batang Gasan sebesar Rp1.200.000,00;
 - o) Kecamatan Enam Lingkung sebesar Rp7.000.000,00;
 - p) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp406.323.461,99;

- q) Dinas Kesehatan sebesar Rp314.422.332,30;
 - r) Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp14.998.909.177,95;
 - s) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp292.008.464,00;
 - t) Dinas Perhubungan sebesar Rp32.540.800,00;
 - u) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp11.594.000,00;
 - v) Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp153.947.250,00;
 - w) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp417.959.907,00;
 - x) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp242.638.288,25;
 - y) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp126.287.000,00;
 - z) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp8.638.500,00;
 - aa) Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM sebesar Rp105.878.718,00;
 - bb) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian sebesar Rp170.982.500,00;
 - cc) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp125.228.445,00;
 - dd) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp3.800.000,00;
 - ee) Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp46.106.879,00;
 - ff) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp119.626.500,00;
 - gg) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp61.154.850,00;
 - hh) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp134.268.425,00;
 - ii) Dinas Perikanan sebesar Rp245.800.750,00.
- 2) Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.927.164.620,00 terdiri dari:
- a) Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp174.788.170,00 berupa:
 - (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Belanja BOS) sebesar Rp23.525.000,00;
 - (2) Dinas Kesehatan (Belanja BLUD Puskesmas) sebesar Rp22.800.000,00;
 - (3) Rumah Sakit Umum Daerah (Bangunan Rumah Genset) sebesar Rp128.463.170,00;
 - b) Reklasifikasi ke Jalan Jembatan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp110.105.325,00 berupa:
 - (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Belanja BOS) sebesar Rp18.600.000,00;
 - (2) Dinas Kesehatan (Belanja BLUD Puskesmas) sebesar Rp91.505.325,00;

- c) Reklasifikasi ke Aset Lain Lain Rusak Berat sebesar Rp630.115.400,00 berupa:
- (1) Kecamatan Sungai Geringging sebesar Rp14.503.000,00;
 - (2) Kecamatan IV Koto Aur Malintang sebesar Rp22.900.000,00;
 - (3) Kecamatan Sungai Limau sebesar Rp2.300.000,00;
 - (4) Kecamatan 2X11 Enam Lingkung sebesar Rp10.500.000,00;
 - (5) Kecamatan Patamuan sebesar Rp50.515.000,00;
 - (6) Kecamatan Batang Gasan sebesar Rp2.736.500,00;
 - (7) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp72.199.400,00;
 - (8) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp425.444.000,00;
 - (9) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp29.017.500,00;
- d) Reklasifikasi ke Ekstrakompatabel sebesar Rp1.833.952.135,00 sebagai berikut:
- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.664.323.622,00;
 - (2) Dinas Kesehatan sebesar Rp151.950.953,00;
 - (3) RSUD sebesar Rp15.189.000,00;
 - (4) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp495.960,00;
 - (5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp829.600,00;
 - (6) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp1.163.000,00;
- e) Reklasifikasi ke Barang dan Jasa sebesar Rp178.203.590,00 dengan rincian:
- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp11.245.000,00;
 - (2) Dinas Kesehatan sebesar Rp152.654.550,00;
 - (3) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp900.000,00; dan
 - (4) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp13.404.040,00.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

3. Gedung dan Bangunan

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
1.081.759.974.520,61	1.062.489.762.711,23

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.081.759.974.520,61. Nilai ini tidak termasuk nilai gedung yang belum selesai dikerjakan Tahun 2023. Rincian Gedung dan bangunan sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	1.062.489.762.711,23
a. Belanja Modal 2023 (+)	Rp	29.755.595.199,76
b. Hibah dari Pihak Ketiga (+)	Rp	454.658.160,00

c. Utang Jangka Pendek (+)	Rp	134.733.915,00
d. Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan (+)	Rp	1.238.202.481,82
e. Penghapusan (-)	Rp	(4.719.755.374,00)
f. Hibah Ke Pihak Ketiga (-)	Rp	(265.887.552,00)
g. Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan (-)	Rp	(7.327.335.021,20)
Saldo akhir	Rp	1.081.759.974.520,61

Penambahan Aset Gedung dan Bangunan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp29.755.595.199,76 adalah berdasarkan LRA Tahun 2023;
- b. Hibah dari Pihak Ketiga sebesar Rp454.658.160,00 berupa:
 - 1) Sekretariat Daerah (Hibah rehab ruang *Command Center* dari PLN ICON PLUS ke Kabupaten Padang Pariaman dengan tanggal BAST 12 September 2023; Rp 389.658.160,00
 - 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Hibah dari Komite pada sekolah); Rp 65.000.000,00
- c. Utang Jangka Pendek pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan pekerjaan pembangunan pagar SDN 21 Batang Anai per 31 Desember 2023 belum dibayarkan sebesar Rp134.733.915,00;
- d. Reklasifikasi ke Gedung Bangunan sebesar Rp1.238.202.481,82 sebagai berikut:
 - 1) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp174.788.170,00 berupa:
 - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Belanja BOS) sebesar Rp23.525.000,00;
 - b) Dinas Kesehatan (Belanja BLUD Puskesmas) sebesar Rp22.800.000,00;
 - c) Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp128.463.170,00;
 - 2) Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan realisasi belanja perencanaan dan pengawasan pembangunan pagar SDN 21 Batang Anai pada LKPD *Unaudited* tercatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan karena pekerjaan fisiknya belum selesai dan belum dibayarkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.479.343,00;
 - 3) Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat sebesar Rp854.281.882,00 merupakan bangunan yang berubah kondisi menjadi baik setelah adanya rehab pada tahun 2023 yaitu:

- a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Rehab pada SDN 18 dan SDN 26 Sungai Limau sebesar Rp795.195.802,00;
 - b) Dinas Kesehatan (Rehab Puskesmas Pembantu Koto Muaro) sebesar Rp59.086.080,00; dan
- 4) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp198.653.086,82 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah realisasi belanja Hibah Barang ke Masyarakat untuk pembangunan Gedung UPT KB di Lubuk Alung.

Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penghapusan senilai Rp4.719.755.374,00 merupakan penghapusan Gedung dan Bangunan sesuai dengan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 508/KEP/BPP/2023, Nomor 509/KEP/BPP/2023, Nomor 511/KEP/BPP/2023, dan Nomor 512/KEP/BPP/2023 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas Kesehatan sebesar Rp3.595.835.040,00;
 - 2) Dinas Perhubungan sebesar Rp233.984.334,00;
 - 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp889.936.000,00;
- b. Hibah kepada Pihak Ketiga senilai Rp265.887.552,00 merupakan Hibah Bangunan Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Pandan yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp7.327.335.021,20 dapat dirinci sebagai berikut:
 - 1) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp249.490.000,00 merupakan pembelian peralatan TIK SD yang direalisasikan pada rekening belanja modal Gedung dan Bangunan (DAK 2023) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp5.152.154.086,20 dengan rincian:
 - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Pagar SDN 21 Batang Anai) sebesar Rp10.479.343,00;
 - b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Lanjutan Pembangunan Kantor DPRD) sebesar Rp429.400.000,00;
 - c) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Lanjutan Pembangunan Sport Hall) sebesar Rp4.712.274.743,20;
 - 3) Reklasifikasi ke Barang dan Jasa merupakan realisasi belanja modal gedung bangunan sebesar Rp653.069.665,00 yang peruntukannya bukan untuk barang milik daerah. Realisasi ini terjadi pada:
 - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merealisasikan belanja perencanaan dan pengawasan untuk sekolah swasta senilai Rp10.467.863,00;
 - b) Dinas Perikanan merealisasikan pembuatan jalan rabat beton untuk Nagari Ulakan Tapakis sebesar Rp642.601.802,00; dan

- 4) Reklasifikasi ke Utang Jangka Pendek sebesar Rp1.272.621.270,00 merupakan utang jangka pendek tahun 2022 atas lanjutan pembangunan Sentra IKM pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian yang sudah dicatatkan ke Aset Tetap Gedung Bangunan pada tahun 2022 senilai Rp1.272.621.270,00.

Disamping itu masih terdapat 26 unit gedung dan bangunan yang didanai oleh *District Health System* versi 2 (DHS2) dan telah dimanfaatkan tetapi belum dicatat karena belum diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Adapun rincian unit gedung dan bangunannya tersebut adalah:

Tabel 5. 47. Rincian Unit Gedung dan Bangunan DHS2

No.	Nama Fasilitas Kesehatan	Alamat
1.	Kantor Dinas Kesehatan	Kecamatan Enam Lingkung
2.	Puskesmas Sintuk	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang
3.	Puskesmas Pembantu Pasar Sintuk	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang
4.	Puskesmas Pembantu Batu Mangaum	Kecamatan Sungai Geringging
5.	Puskesmas Pembantu Kampung Dadok	Kecamatan Sungai Geringging
6.	Puskesmas Pembantu Malai Tengah	Kecamatan Batang Gasan
7.	Puskesmas Pembantu Barang-barangan	Kecamatan Batang Gasan
8.	Puskesmas Pembantu Sungai Pingai	Kecamatan IV Koto Aur Malintang
9.	Puskesmas Pembantu Koto Dalam	Kecamatan Padang Sago
10.	Puskesmas Pembantu Bukit Gonggang	Kecamatan V Koto Kampung Dalam
11.	Puskesmas Pembantu Labu Kumbung	Kecamatan Patamuhan
12.	Puskesmas Pembantu Durian Dangka	Kecamatan V Koto Kampung Dalam
13.	Polindes Du (Kp.Ladang Limau Purut)	Kecamatan V Koto Timur
14.	Polindes Kampung Tengah	Kecamatan Padang Alai
15.	Polindes Sunur Tengah	Kecamatan Nan Sabaris
16.	Polindes Kampung Kandang	Kecamatan Nan Sabaris
17.	Polindes Padang Karambia	Kecamatan Sungai Limau
18.	Polindes Lambéh	Kecamatan Sungai Geringging
19.	Polindes Satu (Talau Atas Limau Purut)	Kecamatan V Koto Timur
20.	Polindes Padang Kunik	Kecamatan Batang Anai
21.	Polindes Batang Piaman	Kecamatan V Koto Timur
22.	Polindes Ulakan	Kecamatan Ulakan Tapakis
23.	Polindes Kantarok	Kecamatan Batang Gasan
24.	Polindes Tanjung Alai	Kecamatan Sungai Geringging
25.	Polindes Lubuk Napa	Kecamatan 2X11 Kayu Tanam
26.	Polindes Malai	Kecamatan Sungai Geringging

Rincian lebih lanjut tentang aset Gedung dan bangunan dapat dilihat pada **Lampiran 12.**

4. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
2.566.695.708.812,05	2.520.040.258.080,24

Nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.566.695.708.812,05 terdiri dari:

Saldo Awal	Rp	2.520.040.258.080,24
▪ Belanja Modal 2023 (+)	Rp	119.326.461.876,00
▪ Utang Jangka Pendek (+)	Rp	58.337.450,00
▪ Hibah dari Pihak Ketiga (+)	Rp	66.013.000,00
▪ Reklasifikasi ke Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi (+)	Rp	725.730.605,00
▪ Hibah ke Pihak Ketiga (-)	Rp	(58.560.874.798,19)
▪ Reklasifikasi dari Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi (-)	Rp	(14.960.217.401,00)
Saldo akhir	Rp	2.566.695.708.812,05

Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp119.326.461.876,00 berdasarkan LRA Tahun 2023;
- b. Utang Jangka Pendek sebesar Rp58.337.450,00 merupakan pembayaran belanja modal retensi (5%) yang belum terbayarkan atas pekerjaan pembangunan jembatan dan irigasi tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Hibah dari Pihak Ketiga merupakan hibah dari PLN Icon Plus berupa jaringan listrik untuk ruang *Command Centre* pada Sekretariat Daerah senilai Rp66.013.000,00;
- d. Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp725.730.605,00 adalah:
 - 1) Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin terdiri dari:
 - a) Belanja BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Rp 18.600.000,00
 - b) Belanja Modal BLUD Puskesmas berupa Jaringan Listrik (tambah daya) pada Dinas Kesehatan; Rp 91.505.325,00
 - 2) Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa perencanaan pembangunan jembatan tahun 2022 yang fisiknya dilaksanakan tahun 2023 sebesar Rp199.396.500,00;
 - 3) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa terdiri dari:

- a) Pembuatan sumur bor pada Inspektorat Kabupaten; Rp 18.507.000,00
- b) Rehabilitasi Jembatan IKK Parit Malintang; dan Rp 199.700.000,00
- c) Pengadaan Meterisasi pada Dinas Perhubungan. Rp 198.021.780,00

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Hibah ke Pihak Ketiga berupa hibah Jaringan Perpipaan dan Air Bersih (tahun perolehan 2009 sampai 2019 yang tercatat di KIB D (JIJ) Dinas PUPR) ke Nagari - nagari dan PDAM senilai Rp58.560.874.798,19;
- b. Reklasifikasi dari Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp14.960.217.401,00 terdiri dari:
 - 1) Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp6.948.333.154,00 terdiri dari:
 - a) Realisasi belanja modal perencanaan jalan dan irigasi yang fisiknya dilaksanakan pada tahun berikutnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp667.514.700,00;
 - b) Realisasi belanja modal Bendungan /Cekdam di Sungai Limau yang putus kontrak pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp6.280.818.454,00;
 - 2) Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud senilai Rp849.090.277,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah realisasi belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Master Plan Drainase Kabupaten Padang Pariaman;
 - 3) Reklasifikasi ke Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp297.579.000,00 adalah realisasi belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Perencanaan atas pekerjaan barang yang akan diserahkan ke masyarakat; dan
 - 4) Reklasifikasi ke Utang Jangka Pendek atas Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp6.865.214.970,00 merupakan pembayaran utang tahun 2022 atas pembangunan jalan paket I, II dan III DAU Hotmix.

Rincian tentang Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

5. Aset Tetap Lainnya

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
90.073.340.927,35	84.963.226.604,35

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp90.073.340.927,35 merupakan nilai buku perpustakaan, barang bercorak seni/budaya dan lainnya yang tidak bisa dikelompokkan kedalam empat jenis aset tetap di atas dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	84.963.226.604,35
▪ Belanja Modal 2023 (+)	Rp	5.105.919.323,00
▪ Hibah dari Pihak Ketiga (+)	Rp	4.195.000,00
Saldo akhir	Rp	90.073.340.927,35

Penambahan aset tetap lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.105.919.323,00 adalah berdasarkan LRA Tahun 2023; dan
- Hibah dari pihak ketiga sebesar Rp4.195.000,00 merupakan hibah dari Komite ke SDN 04 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Rincian lebih lanjut tentang aset Tetap lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	83.838.743.955,20	71.948.132.558,00
Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp83.838.743.955,20 dengan rincian sebagai berikut:		
Saldo Awal	Rp	71.948.132.558,00
Reklasifikasi dari Belanja Gedung Bangunan	Rp	5.152.154.086,20
Reklasifikasi dari Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi (+)	Rp	6.948.333.154,00
Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan (-)	Rp	(10.479.343,00)
Reklasifikasi ke Aset Jalan Jembatan Jaringan Irigasi (-)	Rp	(199.396.500,00)
Saldo akhir	Rp	83.838.743.955,20

Penambahan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari:

- Reklasifikasi dari Belanja Gedung Bangunan sebesar Rp5.152.154.086,20 merupakan:
 - Perencanaan dan Pengawasan pekerjaan pembangunan pagar SDN 21 Batang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp10.479.343,00;
 - Pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor DPRD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp429.400.000,00;
 - Pekerjaan lanjutan pembangunan *Sport Hall* pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga senilai Rp4.712.274.743,20;
- Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan merupakan perencanaan dan pengawasan pembangunan pagar SDN 21 Batang sebesar Rp10.479.343,00 yang pekerjaan fisiknya diakui sebagai Utang Jangka Pendek pada LKPD Audited 2023;

- c) Dinas Kesehatan sebesar Rp110.582.151,00;
 - d) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp9.256.996,00;
 - e) Dinas Perhubungan sebesar Rp1,00;
 - f) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp292.500,00;
- 2) Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat sebesar Rp795.195.802,00 merupakan reklasifikasi akumulasi penyusutan aset lain-lain gedung bangunan karena berubah kondisi menjadi baik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN 16 dan 26 Sungai Limau);
- b. Koreksi Kurang Akumulasi Penyusutan sebesar Rp80.287.597.156,35 terdiri dari:
- 1) Koreksi Lebih Saldo Awal sebesar Rp60.045.006,33 merupakan perhitungan kembali saldo awal Akumulasi Penyusutan sebagai akibat penggabungan pencatatan dan pembulatan masing-masing:
 - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp 60.044.991,33
 - b) RSUD Padang Pariaman Rp 2,00
 - c) Dinas Perhubungan Rp 12,00
 - d) Dinas Perikanan Rp 1,00
 - 2) Hibah ke Pihak Ketiga senilai Rp56.938.562.565,19 pada Dinas PUPR merupakan akumulasi penyusutan yang diserahkan ke Nagari-nagari dan PDAM karena penyerahan Jaringan Perpipaan dan Air Bersih;
 - 3) Penghapusan sebesar Rp22.675.094.218,83 merupakan perhitungan akumulasi penyusutan sebagai akibat penghapusan aset tetap peralatan mesin dan gedung bangunan masing-masing:
 - a) Sekretariat Daerah Rp 389.000.000,00
 - b) Sekretariat DPRD Rp 1.143.429.873,34
 - c) Badan Pengelola Keuangan Daerah Rp 407.629.450,00
 - d) Inspektorat Daerah Rp 40.727.000,00
 - e) Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Rp 122.969.600,00
 - f) Kecamatan Lubuk Alung Rp 15.494.250,00
 - g) Kecamatan Sungai Geringging Rp 10.000.000,00
 - h) Kecamatan Sungai Limau Rp 76.130.167,00
 - i) Kecamatan V Koto Kampung Dalam Rp 54.629.167,00
 - j) Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Rp 31.573.800,00
 - k) Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Rp 18.510.725,00
 - l) Kecamatan Patamuan Rp 5.541.083,00
 - m) Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Rp 20.062.417,00
 - n) Kecamatan Batang Gasan Rp 1.200.000,00
 - o) Kecamatan Enam Lingkung Rp 7.000.000,00
 - p) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp 402.760.844,99
 - q) Dinas Kesehatan Rp 2.293.409.557,30
 - r) RSUD Rp 14.841.235.100,95
 - Rp 292.008.464,00

s)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
t)	Dinas Perhubungan	Rp	178.854.436,00
u)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	11.594.000,00
v)	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	115.869.349,00
w)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	401.613.223,00
x)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp	242.414.090,25
y)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp	126.287.000,00
z)	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp	8.638.500,00
aa)	Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	Rp	103.890.385,00
bb)	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Rp	170.060.166,00
cc)	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Rp	124.786.781,00
dd)	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp	3.800.000,00
ee)	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Rp	36.528.839,00
ff)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	543.008.950,00
gg)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Rp	57.824.890,00
hh)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp	130.811.360,00
ii)	Dinas Perikanan	Rp	245.800.750,00
4)	Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp613.895.366,00 merupakan perhitungan akumulasi penyusutan sebagai akibat reklasifikasi ke Aset Lain-lain terdiri dari:		
a)	Kecamatan Sungai Geringging	Rp	12.918.666,00
b)	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	Rp	22.900.000,00
c)	Kecamatan Sungai Limau	Rp	2.300.000,00
d)	Kecamatan 2X11 Enam Lingkung	Rp	10.500.000,00
e)	Kecamatan Patamuan	Rp	50.515.000,00
f)	Kecamatan Batang Gasan	Rp	2.736.500,00
g)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	66.850.833,00
h)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp	416.156.867,00
i)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	29.017.500,00
	Penyusutan Tahun 2023 sebesar Rp(198.155.226.321,18) terdiri dari:		
a.	Peralatan dan Mesin	Rp	(38.156.187.699,00)
b.	Gedung dan Bangunan	Rp	(50.669.154.218,18)
c.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	(109.329.884.404,00)

No.	Nama	Nilai (Rp)
8.	Ramlan	5.915.292,00
9.	Suripno Azhari	5.300.000,00
10.	Surya Warsilah	24.000.000,00
11.	Normansyah	8.698.550,00
Jumlah		141.596.387,00

2. Aset Tak Berwujud

Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
6.652.982.964,00	5.768.892.687,00

Nilai Rp6.652.982.964,00 merupakan saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023, yang terdiri dari:

Saldo Awal	Rp	5.768.892.687,00
Reklas dari Aset Tetap (+)	Rp	849.090.277,00
Reklas dari Barang Jasa (+)	Rp	35.000.000,00
Saldo akhir	Rp	6.652.982.964,00

Aset tak berwujud merupakan *software* dan kajian yang berada pada SKPD dan masih digunakan dengan penambahan Tahun 2023 sebesar Rp884.090.277,00 berupa:

- a. Reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan Jembatan Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Master Plan Drainase Kabupaten Padang Pariaman. senilai Rp849.090.277,00; dan
- b. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Pengembangan Aplikasi Online PPDB senilai Rp35.000.000,00.

Rincian lebih lanjut tentang aset lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 17**.

3. Aset Lain-lain

Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
16.809.387.361,84	19.231.950.358,05

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.809.387.361,84 merupakan aset kondisi rusak berat yang belum diterbitkan SK penghapusannya, aset dalam penelusuran berkondisi rusak berat dan Investasi Non Permanen yang krediturnya tidak diketahui

Rincian saldo akun Aset Lain-lain sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp 19.231.950.358,05
Reklasifikasi dari aset tetap (+)	Rp 630.115.400,00
Penghapusan (-)	Rp (2.198.396.514,21)
Reklasifikasi ke Aset Tetap (-)	Rp (854.281.882,00)
Saldo akhir	Rp 16.809.387.361,84

Penambahan Aset Lain-lain dapat diuraikan sebagai berikut:

Reklasifikasi dari aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp630.115.400,00 merupakan peralatan mesin yang sudah rusak berat dan tidak bisa dimanfaatkan pada :

a. Kecamatan Sungai Geringging	Rp 14.503.000,00
b. Kecamatan IV Koto Aur Malintang	Rp 22.900.000,00
c. Kecamatan Sungai Limau	Rp 2.300.000,00
d. Kecamatan 2X11 Enam Lingkung	Rp 10.500.000,00
e. Kecamatan Patamuan	Rp 50.515.000,00
f. Kecamatan Batang Gasan	Rp 2.736.500,00
g. Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp 72.199.400,00
h. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp 425.444.000,00
i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 29.017.500,00

Pengurangan Aset Lain-lain dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penghapusan Aset Lain-lain sebesar Rp2.198.396.514,21 merupakan penghapusan Aset Rusak Berat terdiri dari:

1) Penghapusan Aset Rusak Berat Peralatan dan Mesin berdasarkan SK Bupati Padang Pariaman Nomor 510/KEP/BPP/2023 dan Nomor 559/KEP/BPP/2023 sebesar Rp1.334.654.784,41 pada:

a) Sekretariat DPRD	Rp 108.311.862,65
b) Badan Pengelola Keuangan Daerah	Rp 8.643.000,00
c) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Rp 39.671.000,00
d) Kecamatan Sungai Limau	Rp 7.063.000,00
e) Kecamatan V Koto Kampung Dalam	Rp 2.100.000,00
f) Kecamatan Batang Anai	Rp 9.000.000,00
g) Kecamatan V Koto Timur	Rp 500.000,00
h) Kecamatan Patamuan	Rp 4.000.000,00
i) Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	Rp 2.451.450,00
j) Kecamatan Batang Gasan	Rp 11.000.000,00

- | | | | |
|-----|--|----|----------------|
| k) | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rp | 86.659.586,00 |
| l) | RSUD | Rp | 489.518.187,76 |
| m) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp | 42.000.000,00 |
| n) | Dinas Perhubungan | Rp | 33.236.929,00 |
| o) | Dinas Komunikasi dan Informatika | Rp | 66.952.500,00 |
| p) | Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Rp | 15.777.937,00 |
| q) | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Rp | 33.700.000,00 |
| r) | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Rp | 34.120.182,00 |
| s) | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Rp | 37.724.500,00 |
| t) | Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM | Rp | 124.011.900,00 |
| u) | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perizinan | Rp | 2.000.000,00 |
| v) | Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga | Rp | 24.170.000,00 |
| w) | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | Rp | 102.097.750,00 |
| x) | Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran | Rp | 20.005.000,00 |
| y) | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Rp | 575.000,00 |
| z) | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | Rp | 10.205.000,00 |
| aa) | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Rp | 19.160.000,00 |
- 2) Penghapusan Gedung dan Bangunan dalam keadaan Rusak Berat dan adanya pembangunan ruang baru dengan SK Nomor 508/KEP/BPP/2023, Nomor 509/KEP/BPP/2023, Nomor 511/KEP/BPP/2023 dan Nomor 512/KEP/BPP/2023 senilai Rp863.741.729,80 pada Puskesmas dan Pustu di lingkungan Dinas Kesehatan.
- b. Reklasifikasi dari Aset Lain-lain sebesar Rp854.281.882,00 merupakan:
- 1) Reklasifikasi Aset Rusak Berat Gedung Bangunan ke Aset Tetap sebesar Rp854.281.882,00 pada:
 - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN 18 dan 26 Sungai Limau) Rp 795.195.802,00
 - b) Dinas Kesehatan (Pustu Koto Muaro) Rp 59.086.080,00
 - 2) Aset Lain-lain Rusak Berat sebesar Rp16.421.233.954,84 (rincian dapat dilihat pada **Lampiran 19**);
 - 3) Aset Lain-lain Dalam Penelusuran sebesar Rp25.629.000,00 (rincian dapat dilihat pada **Lampiran 20**);

- 4) Kas dalam penelusuran pada kegiatan reklamasi sebesar Rp41.824.407,00;
- 5) Reklasifikasi Dana Bergulir yang masih dalam penelusuran sebesar Rp170.700.000,00; dan
- 6) Reklasifikasi Investasi Non Permanen ke Perusda Saiyo yang sudah dibubarkan sebesar Rp150.000.000,00.

4. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
(4.952.890.166,40)	(4.239.476.519,00)

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp(4.952.890.166,40) terdiri dari:

Saldo Awal	Rp (4.239.476.519,00)
Amortisasi 2023 (+)	Rp (680.821.847,40)
Koreksi Kurang Catat(+)	Rp (32.591.800,00)
Saldo akhir	Rp (4.952.890.166,40)

Amortisasi Aset Tak Berwujud untuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp(680.821.847,40)

Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

5. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
(16.311.721.954,84)	(18.734.284.951,05)

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp(16.311.721.954,84) terdiri dari :

Saldo Awal	Rp (18.734.284.951,05)
Reklasifikasi dari Aset Tetap (+)	Rp (613.895.366,00)
Penghapusan (-)	Rp 2.193.047.947,21
Reklasifikasi ke Aset Tetap (-)	Rp 854.281.882,00
Penyusutan tahun 2023 (+)	Rp (10.871.467,00)
Saldo akhir	Rp (16.311.721.954,84)

Penambahan dan Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penambahan akumulasi penyusutan aset lain-lain berasal dari:

- 1) Reklasifikasi dari aset tetap peralatan mesin yang berubah kondisi menjadi rusak berat sebesar Rp613.895.366,00 pada :

a) Kecamatan Sungai Geringging	Rp	12.918.666,00
b) Kecamatan IV Koto Aur Malintang	Rp	22.900.000,00
c) Kecamatan Sungai Limau	Rp	2.300.000,00
d) Kecamatan 2X11 Enam Lingkung	Rp	10.500.000,00
e) Kecamatan Patamuan	Rp	50.515.000,00
f) Kecamatan Batang Gasan	Rp	2.736.500,00
g) Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	66.850.833,00
h) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp	416.156.867,00
i) Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	29.017.500,00

b. Pengurangan akumulasi penyusutan aset lain-lain berasal dari:

1) Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp2.193.047.947,21 pada:

a) Sekretariat DPRD	Rp	108.311.862,65
b) Badan Pengelola Keuangan Daerah	Rp	8.643.000,00
c) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Rp	39.671.000,00
d) Kecamatan Sungai Limau	Rp	7.063.000,00
e) Kecamatan V Koto Kampung Dalam	Rp	2.100.000,00
f) Kecamatan Batang Anai	Rp	9.000.000,00
g) Kecamatan V Koto Timur	Rp	500.000,00
h) Kecamatan Patamuan	Rp	4.000.000,00
i) Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	Rp	2.451.450,00
j) Kecamatan Batang Gasan	Rp	11.000.000,00
k) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	86.659.586,00
l) Dinas Kesehatan	Rp	863.741.729,80
m) RSUD	Rp	489.518.187,76
n) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	42.000.000,00
o) Dinas Perhubungan	Rp	33.236.929,00
p) Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	61.603.933,00
q) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	15.777.937,00
r) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	33.700.000,00

1. Kewajiban Jangka Pendek

Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
8.081.966.980,72	16.057.147.481,22

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.081.966.980,72 yang terdiri dari:

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
332.658,00	20.000,00

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp332.658,00 dan sebesar Rp20.000,00. Utang Perhitungan Pihak Ketiga Tahun 2023 merupakan utang Taperum Tahun 2021 sebesar Rp20.000,00 yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2023 belum dilunasi, dan Utang PPN pada Dinas PUPR Tahun 2023 sebesar Rp312.658,00.

b. Pendapatan Diterima Dimuka

Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1.744.322.487,92	1.475.775.000,00

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.744.322.487,92 terdiri dari:

- 1) Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa tanah untuk Bangunan Ruang Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Nagari di RSUD Parit Malintang sebesar Rp24.375.000,00;
- 2) Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa lahan untuk pemasangan dan penempatan Menara Telekomunikasi Bersama (Multi Operator) dan Fasilitas Penunjangnya antara PT. Dayamitra Telekomunikasi dengan Pemda Padang Pariaman Rp7.000.000,00;
- 3) Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa Fasilitas Gedung Kantor Sekretariat Daerah untuk Kantor Kas Bank Nagari dan Ruangan ATM sebesar Rp5.200.000,00;
- 4) Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk Lahan Parkir beserta seluruh Fasilitas Pendukung Lainnya PT Andalas Anai Permai Internasional sebesar Rp1.337.500.000,00;
- 5) Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa Fasilitas Gedung Kantor UPTD Puskesmas Kampung Dalam untuk Kantor Kas Bank Nagari dan Ruangan ATM sebesar Rp36.875.000,00;
- 6) Pendapatan atas Pajak Reklame diterima Dimuka sebesar Rp328.872.487,92; dan

2) Utang Belanja Barang dan Jasa

Tabel 5. 54. Utang Belanja Barang dan Jasa

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	Rp483.572.828,00
	Utang Belanja Barang dan jasa atas iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja (PBPU dan BP) kelas III dari BPJS sebesar Rp471.637.600,00 sesuai hasil reviu Inspektorat nomor LHE/7/INSP/2024.	
	Utang Barang yang diserahkan kepada masyarakat atas pembayaran 8% Pembangunan jamban/MCK pondok Pesantren Bustanul Yakin Lubuk Alung sesuai SPK Nomor 01/add/153/SPK/Dinkes/XII/2023 sebesar Rp11.935.228,00 sesuai hasil reviu Inspektorat nomor LHE/02/INSP/2024.	
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	Rp1.457.768.512,00
	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD atas Belanja Obat-Obatan sebesar Rp646.236.806,00 sesuai hasil Reviu Inspektorat Nomor LHR/03/Insp/2024	
	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD atas Belanja Bahan Laboratorium dan BMHP sebesar Rp811.531.706,00 sesuai hasil Reviu Inspektorat Nomor LHR/03/Insp/2024	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp1.552.048.750,00
	Utang Belanja Barang dan Jasa, Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat atas kegiatan perencanaan pembangunan pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah sebesar Rp1.251.251.350,00 (data terlampir)	
	Utang Belanja Barang dan Jasa, Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat atas kegiatan Cipta Bina Marga pembangunan jalan sebesar Rp255.869.550,00 (data terlampir)	
	Utang Belanja Barang dan Jasa, Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat atas kegiatan Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala pemukiman sebesar Rp44.927.850,00 data terlampir)	
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp1.199.800,00
	Utang Belanja Tagihan Air Bulan November dan Desember 2023.	
5	Dinas Pertanian	Rp30.000.000,00
	Utang Belanja Barang dan Jasa, Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani.	
6	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Rp184.997.000,00
	Utang Belanja Barang dan Jasa, Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa pengadaan alat usaha kelompok pemuda produktif sesuai hasil Reviu Inspektorat Nomor LHR/04/Insp/2024 tanggal 29 Februari 2024.	
Jumlah		3.709.586.890,00

3) Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas pekerjaan Rehabilitasi pagar SDN 21 Batang Anai dengan Nomor Kontrak 7516/SPK/PEMB.SD/DISDIKBUD/IX-2023

yang di Adendum dengan nomor 7516/ADD-1/SPK/PEMB.SD/DISDIKBUD/XI-2023 sebesar Rp134.733.915,00.

4) Utang Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi

Utang Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp58.337.450,00 terdiri dari:

- a) Utang Retensi atas kegiatan pembangunan jaringan irigasi permukaan sebesar Rp37.123.450,00 (data terlampir);
- b) Utang atas kegiatan Bidang Bina Marga Rp21.214.000,00 (data terlampir)

Khusus data terlampir Utang Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Dinas PUPR dapat dilihat pada **Lampiran 22**.

5) Utang Belanja Transfer

Utang Belanja Transfer per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.147.010.905,80 merupakan Utang Transfer Dana Bagi Hasil yang terdiri dari:

- a) Utang Belanja Transfer Pajak dan Retribusi Ke Pemerintah Desa/Nagari yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 55. Utang Belanja Transfer Pajak dan Retribusi

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Transfer DBH Pajak Hotel ke Nagari	8.390.429,40
2.	Transfer DBH Pajak Restoran ke Nagari	133.166.820,40
3.	Transfer DBH Pajak Hiburan ke Nagari	3.845.200,00
4.	Transfer DBH Pajak Reklame ke Nagari	29.158.210,00
5.	Transfer DBH Pajak Penerangan Jalan ke Nagari	527.284.260,10
6.	Transfer DBH Pajak Galian Gol C ke Nagari	85.175.310,00
7.	Transfer DBH Pajak Parkir ke Nagari	47.478.070,30
8.	Transfer DBH Pajak Air Bawah Tanah ke Nagari	277.438.362,00
9.	Transfer DBH BPHTB ke Nagari	489.215.685,60
10.	Transfer DBH PBB Pedesaan & Perkotaan ke Nagari	254.074.188,80
11.	Transfer DBH Retribusi Jasa Umum ke Nagari	59.391.480,00
12.	Transfer DBH Retribusi Jasa Usaha ke Nagari	8.080.928,00
13.	Transfer DBH Retribusi IMB ke Nagari	21.860.373,20
Jumlah		1.944.559.317,80

- b) Utang Belanja Transfer Pemerintah Pusat

Utang Belanja Transfer Pemerintah Pusat berupa lebih bayar dari pemerintah pusat atas Transfer DBH Pajak Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Tahun 2019 sebesar Rp202.451.588,00. Hingga saat ini belum ada keputusan dari Pusat atas kelebihan bayar tersebut.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
41.824.407,00	41.824.407,00

Utang Jangka Panjang Tahun 2023 sebesar Rp41.824.407,00 merupakan Utang Jangka Panjang Lainnya berupa Utang Jaminan Reklamasi.

F. EKUITAS

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
1.317.852.308.140,98	1.324.258.353.152,43

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 di Neraca sebesar Rp1.317.852.308.140,98 merupakan nilai Ekuitas Akhir yang sama tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023.

5.4. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa dan Surplus/Defisit-LO dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya untuk TA 2023.

Adapun rincian dari Laporan Operasional adalah sebagai berikut:

A. PENDAPATAN

Tahun 2023 **Tahun 2022**
(Rp) **(Rp)**
1.317.640.695.346,39 **1.292.118.006.287,47**

Pendapatan-LO Tahun 2023 sebesar Rp1.317.640.695.346,39 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.292.118.006.287,47 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 56. Realisasi Pendapatan-LO

Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan Asli Daerah-LO	159.981.269.509,59	130.668.628.174,15	29.312.641.335,44
Pendapatan Transfer-LO	1.155.814.142.191,80	1.095.990.263.603,00	59.823.878.588,80
Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO	1.845.283.645,00	65.459.114.510,32	(63.613.830.865,32)
Jumlah	1.317.640.695.346,39	1.292.118.006.287,47	25.522.689.058,92

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO

Tahun 2023 **Tahun 2022**
(Rp) **(Rp)**
159.981.269.509,59 **130.668.628.174,15**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 sebesar Rp159.981.269.509,59 dan Tahun 2022 sebesar Rp130.668.628.174,15, masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 5756. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah-LO	71.987.293.403,89	54.724.927.635,24	17.262.365.768,65
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	3.863.434.590,00	2.089.619.567,00	1.773.815.023,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.088.751.162,00	7.214.956.413,00	873.794.749,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah -LO	76.041.790.353,70	66.639.124.558,91	9.402.665.794,79
Jumlah	159.981.269.509,59	130.668.628.174,15	29.312.641.335,44

a. Pendapatan Pajak Daerah - LO

Tahun 2023 **Tahun 2022**
(Rp) **(Rp)**
71.987.293.403,89 **54.724.927.635,24**

Rincian Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 sebesar Rp71.987.293.403,89 dan Tahun 2022 sebesar Rp54.724.927.635,24 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 58. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO

Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pajak Hotel-LO	218.946.253,00	200.571.992,00	18.374.261,00
Pajak Restoran-LO	3.824.851.501,81	2.486.754.287,24	1.338.097.214,57
Pajak Hiburan-LO	167.372.800,00	200.955.600,00	(33.582.800,00)
Pajak Reklame-LO	624.052.668,08	1.006.251.565,00	(382.198.896,92)
Pajak Penerangan Jalan-LO	21.057.720.441,00	19.915.265.373,00	1.142.455.068,00
Pajak Parkir-LO	2.919.636.000,00	1.630.590.000,00	1.289.046.000,00
Pajak Air Tanah-LO	1.452.687.749,00	1.249.987.171,00	202.700.578,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	7.146.130.900,00	3.531.787.190,00	3.614.343.710,00
PBB Pedesaan dan Perkotaan-LO	24.813.456.662,00	13.724.060.998,00	11.089.395.664,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	9.762.438.429,00	10.778.703.459,00	(1.016.265.030,00)
Jumlah	71.987.293.403,89	54.724.927.635,24	17.262.365.768,65

Saldo Pendapatan Pajak Daerah-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp71.987.293.403,89 diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Daerah-LRA Tahun 2023	Rp	61.970.456.485,81
(-) Piutang Pajak Tahun 2022	Rp	(47.004.150.766,00)
(-) Pajak Daerah terima Dimuka Tahun 2023	Rp	(328.872.487,92)
(+) Piutang Pajak Tahun 2023	<u>Rp</u>	<u>57.349.860.172,00</u>
Jumlah	Rp	71.987.293.403,89

b. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Tahun 2023 **Tahun 2022**
(Rp) **(Rp)**
3.863.434.590,00 **2.089.619.567,00**

Rincian Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah selama Tahun 2023 sebesar Rp3.863.434.590,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp2.089.619.567,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 59. Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	580.800.000,00	531.550.000,00	49.250.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	30.524.000,00	26.283.000,00	4.241.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	395.662.900,00	382.085.000,00	13.577.900,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	36.690.500,00	28.434.500,00	8.256.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	38.951.000,00	36.279.700,00	2.671.300,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	445.500.000,00	474.250.000,00	(28.750.000,00)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	169.256.080,00	106.784.920,00	62.471.160,00
Retribusi Terminal-LO	36.092.000,00	33.665.000,00	2.427.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	31.720.000,00	40.025.000,00	(8.305.000,00)
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO	40.050.000,00	40.000.000,00	50.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	2.058.188.110,00	390.017.447,00	1.668.170.663,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	0,00	245.000,00	(245.000,00)
Jumlah	3.863.434.590,00	2.089.619.567,00	1.773.815.023,00

Saldo Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.863.434.590,00 diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Tahun 2023	Rp	3.603.184.590,00
(-) Pendapatan Retribusi Terima Dimuka tahun 2023	Rp	(4.500.000,00)
(-) Piutang Retribusi Tahun 2022	Rp	(572.032.650,00)
(+) Piutang Retribusi Tahun 2023	<u>Rp</u>	<u>836.782.650,00</u>
Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2023	Rp	3.863.434.590,00

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
8.088.751.162,00	7.214.956.413,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2023 sebesar Rp8.088.751.162,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp7.214.956.413,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan bagian laba Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari) berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Nagari dan dari PT BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
76.041.790.353,70	66.639.124.558,91

Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2023 sebesar Rp76.041.790.353,70 dan Tahun 2022 sebesar Rp66.639.124.558,91 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 57. Penerimaan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	0,00	12.840.000,00	(12.840.000,00)
Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO	460.988.772,00	724.091.794,00	(263.103.022,00)
Hasil Sewa BMD-LO	102.325.000,00	101.691.666,67	633.333,33
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	2.878.023.051,00	3.533.534.755,00	(655.511.704,00)
Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	0,00	10.203,00	(10.203,00)
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	77.948,00	184.098,00	(106.150,00)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	0,00	62.157.500,00	(62.157.500,00)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk	680.005.461,84	302740058,82	377.265.403,02
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	2.504.392.337,31	1.316.383.674,80	1.188.008.662,51
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	113.796.388,00	6.366.611,00	107.429.777,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO	206.560,00	0,00	206.560,00

Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO	945.200,00	0,00	945.200,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	166.771.648,00	1.245.916.862,42	(1.079.145.214,42)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	324.014.080,55	733.991.400,00	(409.977.319,45)
Pendapatan dari BLUD-LO	68.810.243.907,00	58.598.826.486,00	10.211.417.421,00
Remunerasi Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)-LO	0,00	389.449,20	(389.449,20)
Jumlah	76.041.790.353,70	66.639.124.558,91	9.402.665.794,79

Apabila dibandingkan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah -LRA dengan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah -LO maka terdapat selisih sebagai berikut:

Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2022	Rp	112.952.405,20
Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah -LO Tahun 2023	Rp	76.041.790.353,70
Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah -LRA Tahun 2023	Rp	(75.900.122.518,70)
Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023	Rp	(189.405.791,00)
Selisih	Rp	65.214.449,20

Selisih sebesar Rp65.214.449,20 disebabkan karena:

1) Pendapatan hasil sewa BMD atas penyesuaian pendapatan diterima dimuka sewa lahan TA 2023	Rp	102.325.000,00
2) Penerimaan Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF) TA 2022	Rp	389.449,20
3) Pendapatan Lain-Lain atas sewa dibayar dimuka lahan ATM Bank Nagari Kampung Dalam TA 2023	Rp	(37.500.000,00)
Jumlah	Rp	65.214.449,20

2. PENDAPATAN TRANSFER

Tahun 2023 **Tahun 2022**
(Rp) **(Rp)**
1.155.814.142.191,80 **1.095.990.263.603,00**

Rincian Pendapatan Transfer-LO Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.155.814.142.191,80 dan Rp1.095.990.263.603,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 61. Rincian Pendapatan Transfer-LO

Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.078.779.861.824,80	1.022.988.587.333,00	55.791.274.491,80
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	77.034.280.367,00	73.001.676.270,00	4.032.604.097,00
Jumlah	1.155.814.142.191,80	1.095.990.263.603,00	59.823.878.588,80

Saldo Pendapatan Transfer-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.155.814.142.191,80 diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

Pendapatan Transfer-LRA 2023	Rp	1.244.088.529.388,00
(-) Penerimaan Piutang Transfer Pusat (TDF) Tahun 2022	Rp	(1.605.774.707,00)
(-) Penerimaan Piutang Transfer Pusat (Remunerasi) Tahun 2022	Rp	(389.449,20)
(-) Penerimaan Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2022	Rp	(11.461.697.483,00)
(-) Dana Desa	Rp	(101.544.125.000,00)
(+) Piutang Transfer Antar daerah Tahun 2022	Rp	26.337.599.443,00
	Rp	1.155.814.142.191,80

Jika dibandingkan Pendapatan Transfer-LRA dengan Pendapatan Transfer-LO maka terdapat perbedaan sebesar Rp114.611.986.639,20 dengan rincian sebagai berikut:

Piutang transfer Tahun 2022	Rp	0,00
Pendapatan transfer-LO Tahun 2023	Rp	1.155.814.142.191,80
Pendapatan transfer-LRA Tahun 2023	Rp	(1.244.088.529.388,00)
Piutang transfer Tahun 2023	Rp	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2023	Rp	(26.337.599.443,00)
Selisih	Rp	(114.611.986.639,20)

Selisih pendapatan transfer-LO sebesar Rp(114.611.986.639,20) merupakan pendapatan yang berasal dari dana desa sebesar Rp101.544.125.000,00 tidak dicatat sebagai Pendapatan-LO, namun tetap dicatat sebagai Pendapatan-LRA. Selanjutnya terdapat penerimaan piutang sebesar Rp11.461.697.483,00 yang merupakan penerimaan piutang transfer antar daerah tahun 2022, penerimaan Piutang *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp1.605.774.707,00 dan penerimaan piutang Remunerasi *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp389.449,20.

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
1.078.779.861.824,80	1.022.988.587.333,00

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 sebesar Rp1.078.779.861.824,80 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.022.988.587.333,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 62. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Dana Perimbangan	1.078.779.861.824,80	1.021.670.920.333,00	57.108.941.491,80
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	1.317.667.000,00	(1.317.667.000,00)
Jumlah	1.078.779.861.824,80	1.022.988.587.333,00	55.791.274.491,80

Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.078.779.861.824,80 diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LRA 2023	Rp	1.181.930.150.981,00
(-) Penerimaan Piutang <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF) Tahun 2022	Rp	(1.605.774.707,00)
(-) Penerimaan Piutang Remunerasi <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF) Tahun 2022	Rp	(389.449,20)
(-) Dana Desa Tahun 2023	<u>Rp</u>	<u>(101.544.125.000,00)</u>
	Rp	1.078.779.861.824,80

Apabila dibandingkan antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA sebesar Rp1.181.930.150.981,00 dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO sebesar Rp1.078.779.861.824,80 maka terdapat perbedaan sebesar Rp103.150.289.156,20 yang tidak dicatat sebagai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO. Perbedaan tersebut terdiri dari:

- 1) Pendapatan yang berasal dari dana desa sebesar Rp101.544.125.000,00;
- 2) Penerimaan Piutang *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp1.605.774.707,00; dan
- 3) Penerimaan piutang Remunerasi *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp389.449,20.

Penjelasan atas Dana Perimbangan – LO sebagai berikut.

1) Dana Perimbangan-LO

Tahun 2023 **Tahun 2022**
(Rp) (Rp)

1.078.779.861.824,80 1.021.670.920.333,00

Rincian Pendapatan Dana Perimbangan-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.078.779.861.824,80 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.021.670.920.333,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 58. Rincian Dana Perimbangan-LO

Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	14.880.641.508,80	19.663.277.787,00	(4.782.636.278,20)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	744.273.216.799,00	704.574.324.710,00	39.698.892.089,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	87.426.804.427,00	93.252.089.236,00	(5.825.284.809,00)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	232.199.199.090,00	204.181.228.600,00	28.017.970.490,00
Jumlah	1.078.779.861.824,80	1.021.670.920.333,00	57.108.941.491,80

Apabila dibandingkan antara Pendapatan Dana Perimbangan-LRA sebesar Rp1.080.386.025.981,00 dengan Pendapatan Dana Perimbangan - LO sebesar Rp1.078.779.861.824,80 maka terdapat perbedaan sebesar Rp1.606.164.156,20 yang tidak dicatat sebagai Pendapatan Dana Perimbangan-LO. Perbedaan tersebut terdiri atas penerimaan piutang Dana TDF sebesar Rp1.605.774.707,00 dan penerimaan piutang atas Remunerasi Dana TDF sebesar Rp389.449,20.

a) Dana Bagi Hasil - LO

Tahun 2023 **Tahun 2022**
(Rp) (Rp)

14.880.641.508,80 19.663.277.787,00

Rincian Pendapatan Transfer-Dana Bagi Hasil Tahun 2023 sebesar Rp14.880.641.508,80 dan Tahun 2022 sebesar Rp19.663.277.787,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 59. Dana Bagi Hasil

Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
DBH PBB-LO	101.192.468,80	6.683.360.586,00	(6.582.168.117,20)
DBH PPh Pasal 21-LO	5.275.349.000,00	8.053.788.755,00	(2.778.439.755,00)
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	0,00	22.194.610,00	(22.194.610,00)
DBH CHT-LO	41.353.040,00	46.468.128,00	(5.115.088,00)
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	300.596.000,00	918.735.378,00	(618.139.378,00)
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	0,00	21.193,00	(21.193,00)
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	1.550.345.000,00	1.624.907.099,00	(74.562.099,00)
DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	5.992.868.000,00	143.737.827,00	5.849.130.173,00
DBH SDA Perikanan-LO	1.618.938.000,00	2.170.064.211,00	(551.126.211,00)
Jumlah	14.880.641.508,80	19.663.277.787,00	(4.782.636.278,20)

Apabila dibandingkan antara Pendapatan DBH - LRA sebesar Rp16.486.805.665,00 dengan Pendapatan DBH - LO sebesar Rp14.880.641.508,80 maka terdapat perbedaan sebesar Rp1.606.164.156,20 yang tidak dicatat sebagai Pendapatan DBH - LO. Perbedaan tersebut terdiri atas penerimaan piutang Dana TDF sebesar Rp1.605.774.707,00 dan penerimaan piutang Remunerasi Dana TDF sebesar Rp389.449,20.

b) Dana Alokasi Umum - LO

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
744.273.216.799,00	704.574.324.710,00

Pendapatan Transfer DAU - LO pada Tahun 2023 sebesar Rp744.273.216.799,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp704.574.324.710,00. Tidak ada perbedaan antara Pendapatan Transfer DAU - LO dengan Pendapatan Transfer DAU - LRA.

c) Dana Alokasi Khusus Fisik - LO

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
87.426.804.427,00	93.252.089.236,00

Pendapatan Transfer DAK Fisik – LO Tahun 2023 sebesar Rp87.426.804.427,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp93.252.089.236,00. Tidak ada perbedaan antara Pendapatan Transfer DAK Fisik – LO dengan Pendapatan Transfer DAK Fisik – LRA.

d) Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
232.199.199.090,00	204.181.228.600,00

Pendapatan Transfer DAK Non Fisik - LO Tahun 2023 sebesar Rp232.199.199.090,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp204.181.228.600,00. Tidak ada perbedaan antara Pendapatan Transfer DAK Non Fisik – LO dengan Pendapatan Transfer DAK Non Fisik – LRA.

2) Dana Insentif Daerah - LO

Tidak ada Pendapatan Transfer DID - LO Tahun 2023.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
77.034.280.367,00	73.001.676.270,00

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2023 sebesar Rp77.034.280.367,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp73.001.676.270,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 60. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah

Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil	76.734.280.367,00	73.001.676.270,00	3.732.604.097,00
Bantuan Keuangan	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
Jumlah	77.034.280.367,00	73.001.676.270,00	4.032.604.097,00

Apabila dibandingkan antara Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO sebesar Rp77.034.280.367,00 dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA sebesar Rp62.158.378.407,00 maka terdapat perbedaan sebesar Rp14.875.901.960,00 yang tidak dicatat sebagai Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA. Perbedaan tersebut merupakan selisih antara penerimaan piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2022 sebesar Rp11.461.697.483,00 dengan

penetapan piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2023 sebesar Rp26.337.599.443,00

Nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO sebesar Rp77.034.280.367,00 diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

Pendapatan Dana Bagi Hasil-LRA 2023	Rp	62.158.378.407,00
(-) Penerimaan Piutang Transfer Pusat Tahun 2022	Rp	(11.461.697.483,00)
(+) Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2023	Rp	26.337.599.443,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	Rp	77.034.280.367,00

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
1.845.283.645,00	65.459.114.510,32

Rincian penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO Tahun 2023 sebesar Rp1.845.283.645,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp65.459.114.510,32 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 66. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	588.525.525,00	62.036.346.175,00	(61.447.820.650,00)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00	1.650.333.335,32	(1.650.333.335,32)
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri-LO	112.645.000,00	473.435.000,00	(360.790.000,00)
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO	0,00	1.299.000.000,00	(1.299.000.000,00)
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	1.144.113.120,00	0,00	1.144.113.120,00
Jumlah	1.845.283.645,00	65.459.114.510,32	(63.613.830.865,32)

Apabila Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO pada Tahun 2023 sebesar Rp1.845.283.645,00 dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah - LRA Tahun 2023 sebesar Rp445.291.000,00 maka terdapat selisih sebesar Rp1.399.992.645,00 yang tidak dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan yang Sah - LRA. Selisih tersebut merupakan Pendapatan Hibah berupa Barang dan Jasa yang direklasifikasi menjadi Aset Tetap yang terdiri atas:

- a. Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp143.234.525,00 berupa:
- 2) Hibah alat kantor lainnya sebesar Rp98.000.000,00;
 - 3) Hibah kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp45.234.525,00;
- b. Hibah dari kelompok masyarakat perorangan dalam negeri sebesar Rp112.645.000,00 berupa:
- 1) Hibah alat kantor lainnya sebesar Rp43.450.000,00;
 - 2) Hibah Gedung Kantor sebesar Rp65.000.000,00;
 - 3) Hibah buku sebesar Rp4.195.000,00; dan
- c. Sumbangan Pihak Ketiga sebesar Rp1.144.113.120,00.
- Penjelasan atas rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO sebagai berikut.

a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
588.525.525,00	62.036.346.175,00

Penerimaan Pendapatan Hibah tahun 2023 sebesar Rp588.525.525,00 terdiri atas:

- 1) Hibah Air Minum sebesar Rp445.291.000,00;
- 2) Hibah dari BNPB sebesar Rp98.000.000,00; dan
- 3) Hibah Kendaraan roda dua 1 unit dari Kemendagri sebesar Rp45.234.525,00.

b. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
0,00	1.650.333.335,32

Tidak ada penerimaan Hibah dari pemerintah daerah lainnya pada Tahun 2023.

c. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri-LO

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
112.645.000,00	473.435.000,00

Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri Tahun 2023 sebesar Rp112.645.000,00 terdiri atas:

- 1) Hibah berupa Alat kantor lainnya sebesar Rp43.450.000,00;
- 2) Hibah berupa Gedung Kantor sebesar Rp65.000.000,00;
- 3) Hibah berupa buku sebesar Rp4.195.000,00.

d. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
0,00	1.299.000.000,00

Tidak ada Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri – LO pada Tahun 2023.

e. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.144.113.120,00	0,00

Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO tahun 2023 sebesar Rp1.144.113.120,00 terdiri atas:

- 1) Hibah Masuk dari PT. ICON untuk ruangan *Command Center* sebesar Rp389.658.160,00;
- 2) Hibah dari PT. ICON atas Jaringan Listrik ruangan *Command Center* sebesar Rp66.013.000,00; dan
- 3) Hibah dari PT. ICON Plus sebesar Rp688.441.960,00.

Pengujian terhadap pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi (LRA) dapat dilihat pada **Lampiran 23**.

B. BEBAN

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.408.501.386.856,00	1.319.157.178.484,97

Rincian beban Tahun 2023 sebesar Rp1.408.501.386.856,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.319.157.178.484,97 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 67. Rincian Beban

Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Pegawai	673.985.437.094,32	672.682.313.447,42	1.303.123.646,90
Beban Barang dan Jasa	333.847.151.976,40	319.064.139.840,69	14.783.012.135,71
Beban Hibah	83.736.969.573,19	12.062.260.500,00	71.674.709.073,19
Beban Bantuan Sosial	300.000.000,00	4.523.350.000,00	(4.223.350.000,00)
Beban Penyisihan Piutang	36.869.449.426,71	33.449.503.926,64	3.419.945.500,07
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	38.156.187.699,00	46.714.812.863,00	(8.558.625.164,00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	50.669.154.218,18	53.684.369.985,00	(3.015.215.766,82)

Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	109.329.884.404,00	97.895.891.855,00	11.433.992.549,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	680.821.847,40	541.505.592,00	139.316.255,40
Beban Bagi Hasil	6.557.366.015,80	6.450.646.985,22	106.719.030,58
Beban Bantuan Keuangan	74.368.964.601,00	72.088.383.490,00	2.280.581.111,00
Jumlah	1.408.501.386.856,00	1.319.157.178.484,97	89.344.208.371,03

Beban Tahun 2023 dibandingkan dengan Beban Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp89.344.208.371,03 atau 6,77%.

Penjelasan atas Beban pada tabel di atas sebagai berikut.

1. Beban Pegawai

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
673.985.437.094,32	672.682.313.447,42

Beban pegawai merupakan beban atas kompensasi, yang dibayarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus pegawai sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp673.985.437.094,32 dan tahun 2022 sebesar Rp672.682.313.447,42 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5. 68. Rincian Beban Pegawai

Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Gaji Pokok ASN	310.719.192.468,00	309.719.586.878,00	999.605.590,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	29.566.700.578,00	29.584.029.151,42	(17.328.573,42)
Beban Tunjangan Jabatan ASN	5.977.820.324,00	6.476.348.661,00	(498.528.337,00)
Beban Tunjangan Fungsional ASN	22.434.708.980,00	22.227.542.293,00	207.166.687,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.772.136.430,00	3.255.738.739,00	516.397.691,00
Beban Tunjangan Beras ASN	17.237.171.918,00	17.180.572.875,00	56.599.043,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	292.304.564,00	412.851.813,00	(120.547.249,00)
Beban Pembulatan Gaji ASN	4.216.145,00	4.273.451,00	(57.306,00)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	12.822.975.904,00	12.757.109.308,00	65.866.596,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	640.808.558,00	636.748.817,00	4.059.741,00

Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.922.412.136,00	1.909.255.934,00	13.156.202,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	84.652.855.337,00	92.322.603.175,00	(7.669.747.838,00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.141.771.647,00	1.594.238.580,00	1.547.533.067,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	2.135.896.500,00	1.978.182.566,00	157.713.934,00
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.388.250.000,00	1.795.625.000,00	592.625.000,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	144.160.000,00	93.594.375,00	50.565.625,00
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	121.108.241.450,00	125.535.939.215,00	(4.427.697.765,00)
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.731.500.000,00	1.756.750.000,00	(25.250.000,00)
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.353.813.459,00	0,00	2.353.813.459,00
Beban Honorarium	5.677.456.000,00	5.641.387.500,00	36.068.500,00
Beban Uang Representasi DPRD	885.990.000,00	892.290.000,00	(6.300.000,00)
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	74.797.800,00	58.027.200,00	16.770.600,00
Beban Tunjangan Beras DPRD	96.970.380,00	72.347.580,00	24.622.800,00
Beban Uang Paket DPRD	76.009.500,00	76.482.000,00	(472.500,00)
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.284.685.500,00	1.293.820.500,00	(9.135.000,00)
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	115.101.000,00	115.649.100,00	(548.100,00)
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	15.894.900,00	28.090.125,00	(12.195.225,00)
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.005.100.000,00	3.024.000.000,00	(18.900.000,00)
Beban Tunjangan Reses	743.400.000,00	756.000.000,00	(12.600.000,00)
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan	797.302,00	862.094,00	(64.792,00)
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.199.584.231,00	3.200.539.434,00	(955.203,00)
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	5.952.000.000,00	5.990.400.000,00	(38.400.000,00)
Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	50.700.000,00	50.700.000,00	0,00

Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.552.000,00	6.552.000,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	91.260.000,00	91.260.000,00	0,00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280,00	6.083.280,00	0,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	375.554,00	417.589,00	(42.035,00)
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	280,00	240,00	40,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.026.560,00	5.483.520,00	(456.960,00)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	102.960,00	112.320,00	(9.360,00)
Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	308.880,00	336.960,00	(28.080,00)
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	524.250.000,00	316.875.000,00	207.375.000,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	11.115.000,00	5.968.125,00	5.146.875,00
Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	0,00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	570.000.000,00	504.000.000,00	66.000.000,00
Beban Pegawai BLUD	28.427.759.569,32	21.192.758.049,00	7.235.001.520,32
Jumlah	673.985.437.094,32	672.682.313.447,42	1.303.123.646,90

Beban pegawai pada tahun 2023 dibandingkan dengan beban tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.303.123.646,90 atau 0,19%.

2. Beban Barang dan Jasa

Tahun 2023 **Tahun 2022**
(Rp) **(Rp)**

333.847.151.976,40 319.064.139.840,69

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar Rp333.847.151.976,40 dan Tahun 2022 sebesar Rp319.064.139.840,69 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 69. Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Barang Pakai Habis	93.424.606.185,66	83.406.975.042,05	10.017.631.143,61
Beban Barang Tak Pakai Habis	0,00	2.300.000,00	(2.300.000,00)
Beban Jasa Kantor	82.193.771.564,00	74.656.397.247,00	7.537.374.317,00

Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	15.420.166.924,00	11.772.916.817,00	3.647.250.107,00
Beban Sewa Tanah	13.132.781,25	2.500.000,00	10.632.781,25
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	4.057.640.167,00	3.159.515.992,00	898.124.175,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	3.229.470.900,00	3.220.863.050,00	8.607.850,00
Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.169.998,00	66.000.000,00	(61.830.002,00)
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	2.806.069,00	0,00	2.806.069,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	445.368.000,00	655.479.860,00	(210.111.860,00)
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	143.777.043,00	397.375.800,00	(253.598.757,00)
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)
Beban Pemeliharaan Tanah	110.703.000,00	0,00	110.703.000,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.423.572.165,00	2.501.031.957,00	(1.077.459.792,00)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	598.583.367,00	1.275.202.203,00	(676.618.836,00)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.376.128.521,00	2.094.182.748,00	(718.054.227,00)
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.738.164.136,00	57.118.729.296,00	(6.380.565.160,00)
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	148.941.370,00	(148.941.370,00)
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	509.410.000,00	0,00	509.410.000,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	924.768.475,00	0,00	924.768.475,00
Beban Barang dan Jasa BOS	46.880.402.377,00	46.940.955.534,00	(60.553.157,00)
Beban Barang dan Jasa BLUD	32.323.510.303,49	31.632.772.924,64	690.737.378,85
Jumlah	333.847.151.976,40	319.064.139.840,69	14.783.012.135,71

Beban barang dan jasa pada tahun 2023 dibandingkan dengan beban tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp14.783.012.135,71 atau 4,63%.

3. Beban Hibah

Tahun 2023 **Tahun 2022**
(Rp) **(Rp)**
83.736.969.573,19 **12.062.260.500,00**

Rincian Beban Hibah tahun 2023 sebesar Rp83.736.969.573,19 dan tahun 2022 sebesar Rp12.062.260.500,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 70. Rincian Beban Hibah

Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	16.561.194.560,00	126.000.000,00	16.435.194.560,00
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	59.337.230.213,19	6.608.416.500,00	52.728.813.713,19
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	40.800.000,00	0,00	40.800.000,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.000.960.000,00	1.907.655.100,00	2.093.304.900,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.840.274.800,00	2.363.678.900,00	476.595.900,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	956.510.000,00	956.510.000,00	0,00
Jumlah	83.736.969.573,19	12.062.260.500,00	71.674.709.073,19

Beban hibah Tahun 2023 sebesar Rp83.736.969.573,19 terdiri atas:

a. Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp16.561.194.560,00 yaitu:

- 1) Beban Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 sebesar Rp11.361.194.560,00 berdasarkan NPHD Nomor 911/174/NPHD.KESBANGPOL-2023 tanggal 10 November 2023 dan Persetujuan Bupati Padang Pariaman tanggal 18 Desember 2023;
- 2) Beban Hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 sebesar

Rp5.200.000.000,00 berdasarkan NPHD Nomor 911/175/NPHD. KESBANGPOL-2023 tanggal 10 November 2023 dan Persetujuan Bupati Padang Pariaman tanggal 18 Desember 2023;

- b. Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp59.337.230.213,19 yaitu:
 - 1) KNPI sebesar Rp350.000.000,00;
 - 2) BAZNAS sebesar Rp150.000.000,00;
 - 3) Pembangunan kantor KAN Lubuk Pandan sebesar Rp265.887.552,00;
 - 4) Reklas Belanja perencanaan & Pengawasan SD Swasta sebesar Rp10.467.863,00;
 - 5) Beban Hibah kepada PDAM dan Pemerintahan Nagari sebesar Rp58.560.874.798,19.
- c. Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp40.800.000,00 merupakan penggantian Uang Tali Asih Veteran LVRI;
- d. Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp4.000.960.000,00 merupakan hibah yang diberikan kepada PMI, KONI, NPC, Pramuka dan Sosial Kemasyarakatan lainnya sebagaimana yang telah dirinci pada Belanja Hibah-LRA;
- e. Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar Rp2.840.274.800,00 merupakan hibah yang diberikan kepada sekolah swasta yang berasal dari dana BOS;
- f. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp956.510.000,00 merupakan hibah yang diberikan kepada partai politik; dan

4. Beban Bantuan Sosial

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
300.000.000,00	4.523.350.000,00

Beban Bantuan Sosial merupakan merupakan beban dalam bentuk uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 sebesar Rp300.000.000,00 dan tahun 2022 sebesar Rp4.523.350.000,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 71. Rincian Beban Bantuan Sosial

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang dianggarkan kepada kelompok masyarakat untuk Dana Bantuan Ketahanan Pangan dan Pertanian tahap 1 Pekerjaan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) DAK Non Fisik TA. 2023 an. KWT Makmur Bersama.	30.000.000,00
2.	Pembayaran belanja bansos uang yang dianggarkan kpd kel masy. untuk dana bantuan Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahap I Pekerjaan P2L DAK NF 2023 sesuai SPK No. 520/02/SPK-P2L/DAKNF/DISTANKP-2023 tanggal 3 Januari 2023 oleh KWT Guci Saiyo.	30.000.000,00
3.	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uan yang dianggarkan kepada kelompok masyarakat untuk Bantuan Ketahanan Pangan dan Pertanian tahap 1 (satu) Pekerjaan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) DAK Non Fisik TA. 2023 an. KWT. Kampung Tengah Sepakat.	30.000.000,00
4.	Pembayaran belanja bansos uang yang dianggarkan kpd kel masy. untuk dana bantuan ketahanan pangan dan pertanian thp I pekerjaan P2L DAKNF TA.2023 Sesuai SPK No. 520/04/SPK-P2L/DAKNF/DISTANKP-2023 TGL 3 Januari 2023 oleh KWT Berok Indah.	30.000.000,00
5.	Pembayaran belanja bansos uang yang dianggarkan kpd kel masy. untuk dana bantuan ketahanan pangan dan pertanian thp I Pekerjaan P2L DAK NF TA.2023 sesuai SPK No. 520/05/SPK-P2L/DAKNF/DISTANKP-2023 tanggal 3 Januari 2023 oleh KWT Bunga Seroja.	30.000.000,00
6.	Pembayaran Dana Tahap II Belanja Bantuan Sosial Uang yang direnc.kpd Kel.Masy untuk Dana Bantuan Ket.Pangan dan Pertanian, Pekerjaan P2L DAK Non Fisik TA.2023 Sesuai SPK No.520/01/SPK-P2L/DAKNF/DistanKP-2023 Tgl 3 Januari 2023 oleh KWT Makmur Bersama.	30.000.000,00
7.	Pembayaran Dana Tahap II Belanja Bantuan Sosial Uang yang dianggarkan kepada Masyarakat untuk Dana Bantuan Ket.Pangan dan Pertanian Pekerjaan P2L DAKNF TA.2023 Sesuai SPK No.520/02/SPK-P2L/DAKNF/DistanKP-2023 Tgl 3 Januari 2023 oleh KWT Guci Saiyo.	30.000.000,00
8.	Pembayaran Dana Thp II Belanja Bantuan Sosial Uang yang dianggarkan kepada Masy untuk Dana Bantuan Ket.Pangan dan Pertanian Pekerjaan P2L DAKNF TA.2023 Sesuai SPK No.520/03/SPK-P2L/DAKNF/DistanKP-2023 Tgl 3 Januari 2023 oleh KWT Kp.Tengah Sepakat.	30.000.000,00
9.	Pembayaran Dana Tahap II Belanja Bantuan Sosial Uang yang dianggarkan kepada Masyarakat untuk Dana Bantuan Ket.Pangan dan Pertanian Pekerjaan P2L DAKNF TA.2023 Sesuai SPK No.520/04/SPK-P2L/DAKNF/DistanKP-2023 Tgl 3 Januari 2023 oleh KWT Berok Indah.	30.000.000,00
10.	Pembayaran Dana Tahap II Belanja Bantuan Sosial Uang yang dianggarkan kepada Masyarakat untuk Dana Bantuan Ket.Pangan dan Pertanian Pekerjaan P2L DAKNF TA.2023 Sesuai SPK No.520/05/SPK-P2L/DAKNF/DistanKP-2023 Tgl 3 Januari 2023 oleh KWT Bunga Seroja.	30.000.000,00
Jumlah		300.000.000,00

5. Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
36.869.449.426,71	33.449.503.926,64

Beban Penyisihan Piutang merupakan pencatatan atas kenaikan piutang berdasarkan persentase tertentu berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp36.869.449.426,71 dan Tahun 2022 sebesar Rp33.449.503.926,64 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 72. Rincian Beban Penyisihan Piutang

No.	Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1.	Beban Penyisihan Pajak Reklame	56.736.378,75	56.255.525,00	480.853,75
2.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	5.611.539,81	4.327.059,27	1.284.480,54
3.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	36.148.965.739,56	32.822.416.908,68	3.326.548.830,88
4.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	507.051.983,50	506.185.733,50	866.250,00
5.	Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro	9.917.874,50	0,00	9.917.874,50
6.	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	3.112.608,37	3.010.212,77	102.395,60
7.	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil	131.687.997,22	57.308.487,42	74.379.509,80
8.	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	6.365.305,00	0,00	6.365.305,00
Jumlah		36.869.449.426,71	33.449.503.926,64	3.419.945.500,07

6. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
38.156.187.699,00	46.714.812.863,00

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 sebesar Rp38.156.187.699,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp46.714.812.863,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 73. Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Penyusutan Alat Angkutan	4.610.044.805,00	4.679.322.308,00	(69.277.503,00)
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	33.546.142.894,00	42.035.490.555,00	(8.489.347.661,00)
Jumlah	38.156.187.699,00	46.714.812.863,00	(8.558.625.164,00)

7. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

**Tahun 2023
(Rp)**

50.669.154.218,18

**Tahun 2022
(Rp)**

53.684.369.985,00

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp50.669.154.218,18 dan Tahun 2022 sebesar Rp53.684.369.985,00, terjadi penurunan sebesar Rp3.015.215.766,82 atau 5,62%.

8. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

**Tahun 2023
(Rp)**

109.329.884.404,00

**Tahun 2022
(Rp)**

97.895.891.855,00

Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023 sebesar Rp109.329.884.404,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp97.895.891.855,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 74. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Penyusutan Jalan	107.905.439.020,00	96.997.711.813,00	10.907.727.207,00
Beban Penyusutan Jembatan	417.167.364,00	0,00	417.167.364,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	0,00	81.873.326,00	(81.873.326,00)
Beban Penyusutan Instalasi Lain	623.974.284,00	366.307.937,00	257.666.347,00
Beban Penyusutan Jaringan Listrik	383.303.736,00	449.998.779,00	(66.695.043,00)
Jumlah	109.329.884.404,00	97.895.891.855,00	11.433.992.549,00

9. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

**Tahun 2023
(Rp)**

680.821.847,40

**Tahun 2022
(Rp)**

541.505.592,00

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 sebesar Rp680.821.847,40 dan Tahun 2022 sebesar Rp541.505.592,00, terjadi kenaikan sebesar Rp139.316.255,40 atau 25,73%.

10. Beban Bagi Hasil

Tahun 2023
(Rp)

6.557.366.015,80

Tahun 2022
(Rp)

6.450.646.985,22

Rincian Beban Bagi Hasil Tahun 2023 sebesar Rp6.557.366.015,80 dan Tahun 2022 sebesar Rp6.450.646.985,22 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 75 Rincian Beban Bagi Hasil

Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	6.197.047.613,60	6.125.889.537,32	71.158.076,28
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	360.318.402,20	324.757.447,90	35.560.954,30
Jumlah	6.557.366.015,80	6.450.646.985,22	106.719.030,58

11. Beban Bantuan Keuangan

Tahun 2023
(Rp)

74.368.964.601,00

Tahun 2022
(Rp)

72.088.383.490,00

Rincian Beban Bantuan Keuangan Tahun 2023 sebesar Rp74.368.964.601,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp72.088.383.490,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 76. Rincian Beban Bantuan Keuangan

Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	0,00	72.088.383.490,00	(72.088.383.490,00)
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	74.368.964.601,00	0,00	74.368.964.601,00
Jumlah	74.368.964.601,00	72.088.383.490,00	2.280.581.111,00

C. SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL

Tahun 2023
(Rp)

(1.672.727.439,00)

Tahun 2022
(Rp)

(1.923.302.195,80)

Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 sebesar Rp(1.672.727.439,00) dan tahun 2022 sebesar Rp(1.923.302.195,80) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 77. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Surplus Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	11.635.821.785,22	4.818.020.900,00	6.817.800.885,22
Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	(13.308.549.224,22)	(6.741.323.095,80)	(6.567.226.128,42)
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(1.672.727.439,00)	(1.923.302.195,80)	250.574.756,80

1. SURPLUS KEGIATAN NON OPERASIONAL

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp)	(Rp)
11.635.821.785,22	4.818.020.900,00

Rincian Surplus Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 sebesar Rp11.635.821.785,22 dan Tahun 2022 sebesar Rp4.818.020.900,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 78. Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Surplus Penjualan Alat Angkutan-LO	28.378.345,66	0,00	28.378.345,66
Surplus Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO	11.594.000,00	0,00	11.594.000,00
Surplus Penjualan Bangunan Gedung-LO	45.796.016,56	0,00	45.796.016,56
Surplus Tukar Menukar Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja- LO	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00
Surplus Tukar Menukar Alat Angkutan-LO	379.126.493,00	337.514.883,00	41.611.610,00
Surplus Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO	67.835.245,00	126.257.759,00	(58.422.514,00)
Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-LO	10.154.486.989,00	4.339.272.037,00	5.815.214.952,00
Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan-LO	166.018.616,00	0,00	166.018.616,00
Surplus Tukar Menukar Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO	59.086.080,00	0,00	59.086.080,00
Surplus Tukar Menukar Bangunan Menara-LO	0,00	14.976.221,00	(14.976.221,00)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	718.250.000,00	0,00	718.250.000,00
Jumlah	11.635.821.785,22	4.818.020.900,00	6.817.800.885,22

2. DEFISIT NON OPERASIONAL-LO

Tahun 2023 (Rp) (13.308.549.224,22)	Tahun 2022 (Rp) (6.741.323.095,80)
--	---

Rincian defisit non operasional-LO tahun 2023 sebesar Rp13.308.549.224,22 dan tahun 2022 sebesar Rp6.741.323.095,80 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 79. Defisit Kegiatan Non Operasional-LO

Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	0,00	782.728,00	(782.728,00)
Defisit Penjualan Aset Lainnya-LO	0,00	1.159.583,00	(1.159.583,00)
Defisit Tukar Menukar Tanah - LO	5.250.000,00	1.314.180.000,00	(1.308.930.000,00)
Defisit Tukar Menukar Alat Angkutan-LO	364.126.493,00	598.021.223,80	(233.894.730,80)
Defisit Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO	17.568.746,00	0,00	17.568.746,00
Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-LO	10.366.301.621,56	3.721.295.622,00	6.645.005.999,56
Defisit Tukar Menukar Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO	72.199.400,00	415.021.829,00	(342.822.429,00)
Defisit Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-LO	0,00	690.862.110,00	(690.862.110,00)
Defisit Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO	312.523.400,66	0,00	312.523.400,66
Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-LO	1.694.738.880,00	0,00	1.694.738.880,00
Defisit Penghapusan Monumen-LO	466.553.550,00	0,00	466.553.550,00
Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO	9.287.133,00	0,00	9.287.133,00
Jumlah	13.308.549.224,22	6.741.323.095,80	6.567.226.128,42

D. POS LUAR BIASA

Tahun 2023 (Rp) 1.729.558.250,00	Tahun 2022 (Rp) 616.219.436,00
---	---

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik seperti kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal TA, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2023 sebesar Rp1.729.558.250,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 80. Rincian Pos Luar Biasa

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Permintaan Pembayaran Pengembalian Honor Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2022 dan Honor Penyusunan RKPD Tahun 2023 terhadap Tim yang telah menyetor ke Kas Daerah	69.966.250,00
2.	Belanja Tidak Terduga Pengamanan Jalan Longsor Padang Kajai - Hulu Banda, Korong Kayu Mudo, Nagari Gunung Padang Alai	800.000.000,00
3.	Pembayaran pembangunan/rehab bendungan D.I Bandar Tanjung Sikukur dan Rehab Jaringan Irigasi Bandar Baru 1 Tandikat	859.592.000,00
Jumlah		1.729.558.250,00

E. SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian Luar Biasa. Pada Tahun 2023 ini terdapat Defisit-LO sebesar Rp(94.262.977.198,61) dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan - LO	Rp	1.317.640.695.346,39
Beban - LO	Rp	1.408.501.386.856,00
Surplus/Defisit Dari Operasional	Rp	(90.860.691.509,61)
Kegiatan Non Operasional	Rp	(1.672.727.439,00)
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	(92.533.418.948,61)
Pos Luar Biasa	Rp	(1.729.558.250,00)
Surplus/Defisit-LO	Rp	(94.262.977.198,61)

5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas bertujuan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Arus Kas Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi. Arus Kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tanpa mengandalkan sumber dana dari luar.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp175.971.216.021,26 yang merupakan selisih surplus antara Arus Kas Masuk dikurangi Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi, dengan uraian sebagai berikut:

1. Arus Masuk Kas selama TA 2023 sebesar Rp1.393.635.346.372,51 terdiri atas:

a. Pendapatan Pajak Daerah	Rp	61.970.456.485,81
b. Pendapatan Retribusi Daerah	Rp	3.603.184.590,00
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	8.088.751.162,00
d. Lain-lain PAD yang Sah	Rp	75.439.133.746,70
e. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp	1.181.930.150.981,00
f. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp	62.158.378.407,00
g. Pendapatan Hibah	Rp	445.291.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	Rp	1.393.635.346.372,51

2. Arus Keluar Kas selama TA 2023 sebesar Rp1.217.664.130.351,25 terdiri atas:

a. Belanja Pegawai	Rp	673.846.730.780,32
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp	335.371.214.311,93
c. Belanja Hibah	Rp	24.899.739.360,00
d. Belanja Bantuan Sosial	Rp	300.000.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan	Rp	175.913.089.601,00
f. Belanja Bagi Hasil	Rp	5.603.798.048,00
g. Pembayaran Kejadian Luar Biasa	Rp	1.729.558.250,00
Jumlah Arus Keluar Kas	Rp	1.217.664.130.351,25

B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi selama TA 2023 defisit sebesar Rp188.831.514.046,76 yang merupakan selisih antara Arus Kas Masuk dikurangi Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi, dengan uraian sebagai berikut:

1. Arus Masuk Kas

Arus kas masuk ini, merupakan penerimaan kas yang diharapkan diperoleh dari penjualan Aset Daerah. Dalam TA 2023 arus kas masuk aktivitas investasi aset non keuangan yang berasal dari pendapatan dari penjualan aset sebesar Rp460.988.772,00.

2. Arus Keluar Kas

Selama Tahun 2023 arus kas keluar sebesar Rp189.292.502.818,76. Pengeluaran ini merupakan pengeluaran dana dari Kas Daerah untuk Belanja Modal yaitu:

- a. Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp34.104.526.420,00 merupakan total realisasi pengeluaran Belanja Modal Tahun 2023 yang dibelanjakan untuk kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor/ rumah tangga, alat studio dan alat kedokteran;
- b. Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp29.755.595.199,76 merupakan total realisasi pengeluaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dipergunakan untuk pembangunan gedung dan bangunan baru serta perbaikan/ rehab gedung dan bangunan lama sehingga dapat berfungsi serta menambah umur ekonomis bangunan tersebut;
- c. Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp119.326.461.876,00 merupakan total realisasi pengeluaran Belanja Modal yang digunakan untuk pembangunan, peningkatan dan perbaikan jalan, jembatan, bangunan irigasi dan jaringan;
- d. Belanja Aset Tetap Lainnya Rp5.105.919.323,00 merupakan total realisasi pengeluaran belanja Aset Tetap Lainnya yang digunakan untuk pengeluaran yang tidak termasuk dalam kategori empat jenis belanja modal di atas, seperti pengeluaran untuk pembelian buku, pembelian tanaman dan barang-barang bercorak budaya; dan
- e. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp1.000.000.000,00 yang merupakan Penyertaan Modal pada Bank Nagari.

C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain dimasa yang akan datang. Arus Kas bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan maupun pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 sebesar Rp332.658,00 dengan uraian sebagai berikut:

1. Penerimaan PFK Rp101.079.955.959,71 terdiri atas:

a. Taperum	Rp	20.000,00
b. Pengeluaran PFK - IWP(1%) Iuran Wajib Pegawai	Rp	7.462.127.161,00
c. Pengeluaran PFK - IWP (8%) Iuran Wajib Pegawai	Rp	21.934.317.351,00
d. Pengeluaran PFK – Taspen	Rp	13.004.088,00
e. Pengeluaran PFK – Askes	Rp	16.027.702.912,00
f. Pengeluaran PFK – JKK	Rp	641.348.678,00
g. Pengeluaran PFK – JKM	Rp	1.924.032.339,00
h. Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun	Rp	125.932.010,00
i. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21	Rp	23.701.358.929,00
j. Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	Rp	880.194.186,00
k. Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa	Rp	297.080.351,00
l. Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	Rp	24.245.549.983,94
m. Pengeluaran PFK – Lainnya		3.827.287.970,77
Jumlah Penerimaan PFK	Rp	101.079.955.959,71

2. Pengeluaran PFK Rp101.079.623.301,71 terdiri atas:

a. Taperum	Rp	0,00
b. Pengeluaran PFK - IWP(1%) Iuran Wajib Pegawai	Rp	7.462.127.161,00
c. Pengeluaran PFK - IWP (8%) Iuran Wajib Pegawai	Rp	21.934.317.351,00
d. Pengeluaran PFK – Taspen	Rp	13.004.088,00
e. Pengeluaran PFK – Askes	Rp	16.027.702.912,00
f. Pengeluaran PFK – JKK	Rp	641.348.678,00
g. Pengeluaran PFK – JKM	Rp	1.924.032.339,00

h. Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun	Rp	125.932.010,00
i. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21	Rp	23.701.358.929,00
j. Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	Rp	880.194.186,00
k. Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa	Rp	297.080.351,00
l. Pengeluaran PFK - PPh Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	Rp	24.245.237.325,94
m. Pengeluaran PFK – Lainnya	Rp	3.827.287.970,77
Jumlah Pengeluaran PFK	Rp	101.079.623.301,71

Akumulasi dari kenaikan/penurunan kas pada Tahun 2023 sebagai berikut.

1. Kenaikan/ Penurunan Kas sebesar Rp(12.859.965.367,50) yang bersumber dari:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	175.971.216.021,26
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(188.831.514.046,76)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
Arus Kas Bersih dari Transitoris	Rp	332.658,00
	Rp	(12.859.965.367,50)

2. Saldo akhir kas sebesar Rp65.903.111.369,79 yang bersumber dari:

Saldo Akhir Kas Di BUD + BLUD	Rp	57.137.244.063,79
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	312.658,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	0,00
Saldo Akhir Kas Bos	Rp	119.055.718,00
Saldo Akhir Kas Lainnya	Rp	8.646.498.930,00
	Rp	65.903.111.369,79

Dengan demikian Saldo kas akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp65.903.111.369,79 yang terdiri dari Saldo Kas di BUD dan BLUD sebesar Rp57.137.244.063,79, (masing-masing sebesar Rp 50.486.009.485,29 kas BUD dan kas BLUD sebesar Rp 6.651.567.236,50), Saldo Kas di Bendahara BOS sebesar Rp119.055.718,00 dan Saldo Kas Lainnya sebesar Rp8.646.498.930,00 .

5.6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Koreksi dan Ekuitas Akhir. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 berasal dari Saldo Ekuitas Awal ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit-LO dan perubahan ekuitas lainnya. Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2023 di Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp1.317.852.308.140,98 adalah nilai Ekuitas yang juga tersaji di Neraca per 31 Desember 2023.

Komponen perhitungan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal pada Neraca awal per 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp1.324.258.353.152,43.

B. SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp(94.262.977.198,61). Perhitungan Defisit-LO adalah sebagai berikut:

Pendapatan – LO	Rp 1.317.640.695.346,39
Beban – LO	Rp 1.408.501.386.856,00
Surplus/Defisit Dari Operasional Kegiatan Non Operasional	Rp (90.860.691.509,61)
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp (92.533.418.948,61)
Pos Luar Biasa	Rp (1.729.558.250,00)
Surplus/Defisit LO	Rp (94.262.977.198,61)

C. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN

1. Koreksi Ekuitas Lainnya

Nilai Koreksi Ekuitas Lainnya pada LPE Tahun 2023 sebesar Rp87.856.932.187,16 terdiri atas koreksi tambah sebesar Rp92.708.753.914,45 dan koreksi kurang sebesar Rp(4.851.821.727,29). Adapun Koreksi Tambah Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp92.708.753.914,45 dengan rincian:

Tabel 5. 81. Koreksi Tambah Ekuitas

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyisihan Piutang Bagi Hasil sebesar Rp57.308.487,42 pada BPKD Kab. Padang Pariaman	57.308.487,42
2.	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyisihan Piutang Retribusi Dinas Kounikasi dan nformasi sebesar Rp506.185.733,50	506.185.733,50
3.	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyisihan Piutang BLUD Puskesmas Batu Basa sebesar Rp16.725,50	16.725,50
4.	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyisihan Piutang BLUD Puskesmas Gasan Gadang sebesar Rp31.971,00	31.971,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
5.	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyisihan Piutang BLUD Puskesmas Padang Sago sebesar Rp3.485,50	3.485,50
6.	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyisihan Piutang BLUD Puskesmas Pauh Kamar sebesar Rp89.821,00	89.821,00
7.	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyisihan Piutang BLUD sebesar Rp28.396,00	28.396,00
8.	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyisihan Piutang BLUD Puskesmas Sungai Sariak Sebesar Rp31.526,00	31.526,00
9.	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyisihan Piutang BLUD Puskesmas Sungai Geringging sebesar Rp44.421,00	44.421,00
10.	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyisihan Piutang BLUD Puskesmas Sintuk sebesar Rp3.485,50	3.485,50
11.	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyisihan Piutang BLUD Puskesmas Sikabu sebesar Rp4.655,50	4.655,50
12.	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyisihan Piutang BLUD Puskesmas Sikukur sebesar Rp13.985,50	13.985,50
13.	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyisihan Piutang BLUD Puskesmas Ulakan Sebesar Rp10.985,5	10.985,50
14.	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada RSUD sebesar Rp1.333.236,20	1.333.236,20
15.	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyesuaian Penyertaan Modal PT BPR-PKPP pada PPKD Kabupaten Padang Pariaman Sebesar Rp70.935.677,48	70.935.677,48
16.	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Persediaan Akhir Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp19.415.249,00	19.415.249,00
17.	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyisihan Piutang Lain lain Pendapatan Asli Daerah pada BPKD Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp11.467.495,75	11.467.495,75
18.	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyesuaian Penyertaan Modal PDAM pada PPKD Kabupaten Padang Pariaman Sebesar Rp280.835.210,41	280.835.210,41
19.	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Dinas Perikanan sebesar Rp 1,00	1,00
20.	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyisihan Piutang PBB pada BPKD Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp32.822.416.908,68	32.822.416.908,68
21.	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah pada BPKD Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp4.327.059,27	4.327.059,27
22.	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyisihan Piutang Pajak Reklame pada BPKD Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp56.255.525,00	56.255.525,00
23.	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Tambah Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bnagunan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp12,00	12,00
24.	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyisihan Piutang TGR pada BPKD Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp4.702.805,00	4.702.805,00
25.	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp 2,00	2,00
26.	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Lebih Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp0,33	0,33
27.	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Lebih Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp60.044.991,00	60.044.991,00
28.	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Mutasi Tambah karena adanya Tukar Menukar antara Pemerintah Kabupaten dengan Kementerian PUPR RI untuk Proyek Strategis Nasioanal dg BAST No: 900/350/BPKD/2023, BAST-CK/2023-0477 tgl 31 Mei 2023 senilai Rp1.834.300.000,00,- dg luas tanah 12 000 m2 Pada Dinas Pertanian	1.834.300.000,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
29.	Koreksi Ekuitas Lainnya untuk menghapus utang belanja transfer tahun lalu yang tercatat lebih besar dari yang seharusnya sebesar Rp10.139.767,32 Pada BPKD Kabupaten Padang Pariaman.	10.139.767,32
30.	Koreksi Ekuitas Lainnya untuk menghapus utang belanja transfer tahun lalu yang tercatat lebih besar dari yang seharusnya sebesar Rp24.564,90 Pada BPKD Kabupaten Padang Pariaman.	24.564,90
31.	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Utang Belanja Barang dan Jasa atas Pekerjaan Perencanaan Hibah Rehabilitasi Gedung Paket III oleh CV. GESTALT ARCHITECTURE dan Perencanaan Lanjutan Pemb. Rehabilitasi Masjid Syeh Burhanuddin oleh CV. TOTAL CITRA CONS Total sebesar Rp39.478.160,00 pada Dinas PUPR	39.478.160,00
32.	Koreksi BPK Untuk Mencatat Koreksi Akumulasi jalan jaringan dan irigasi sebesar Rp56.929.303.570,19 Pada Dinas PUPR	56.929.303.570,19
Jumlah		92.708.753.914,45

2. Koreksi Ekuitas Kurang

Selanjutnya Koreksi Ekuitas Kurang sebesar Rp(4.851.821.727,29) terdiri atas:

Tabel 5. 82. Koreksi Kurang Ekuitas

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (Peralatan) Pada Dinas Komunikasi dan Informasi sebesar Rp292.500,00	292.500,00
2.	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Kurang Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp1,00	1,00
3.	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Tambah Saldo Awal 1,00 atas Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Sekretariat Daerah	1,00
4.	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (Peralatan) sebesar Rp8.944.500,00	8.944.500,00
5.	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp101.637.651,00	101.637.651,00
6.	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 1,00	1,00
7.	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Kurang Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 3.190.000,00	3.190.000,00
8.	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Kurang Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp142.209.271,00	142.209.271,00
9.	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Kurang Catat Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp32.591.800,00	32.591.800,00
10.	Koreksi Ekuitas Lainnya mencatat penyesuaian nilai tanah atas pengukuran ulang lahan pelaksanaan proyek strategis nasional jalan tol tahun 2024 dg SK Penghapusan No 208/KEP/BPP/2024 ttg penghapusan atas koreksi lebih catat BMD berupa tanah sebesar Rp21.050.000,00	21.050.000,00
11.	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyesuaian Penyertaan Modal PDAM sebesar Rp4.522.499.449,55	4.522.499.449,55
12.	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penyesuaian Penyertaan Modal BPR Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp19.406.552,74	19.406.552,74
Jumlah		4.851.821.727,29

D. EKUITAS AKHIR

Ekuitas akhir sebesar Rp1.317.852.308.140,98 adalah sama dengan nilai ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2023.

